

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN
RECOVERY DAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT PASCA BANJIR BANDANG
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Theeza Lestari

18 0401 0140

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2022

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN
RECOVERY DAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT PASCA BANJIR BANDANG
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Theeza Lestari

18 0401 0140

Pembimbing:

Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Theeza Lestari
NIM : 18 0401 0140
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Manyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademiki yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Palopo, 26 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Theeza Lestari


NIM. 18 0401 0140

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul Upaya Pemerintah Daerah dalam Melakukan *Recovery* dan Pemulihan Perekonomian Masyarakat Pasca Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Theeza Lestari, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0401 0140, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa 26 Juli 2022 Miladiyah bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Palopo, 08 Agustus 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Abdi Imam, S.E., M.Si., Ak., CA. | Penguji II | () |
| 5. Muhammad Alwi, S.Sy., M.El. | Pembimbing | () |

Mengetahui


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP 19790724 200312 1002


Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah
Dr. Easna, S.El., M.El.
NIP 19810213 200604 2002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ (اما بعد)

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehinggadengan demikian penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Recovery dan Pemulihan Perekonomian Masyarakat Pasca Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara”** setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada keluarga, parasahabat dan semua pengikut-Nya. Dimana Skripsi ini dibuat sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi dalam bidang ekonomi dan bisnis islam di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo selain itu juga Skripsi ini dapat memberikan manfaat atas apa yang telah dituangkan penulis didalamnya sehinggadapat dijadikan referensi bagi para pembaca yang membutuhkan. Sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, serta bimbingan maupun dorongan dari berbagai pihak meskipun penulisan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis meminta maaf atas kekurangan yang ada karena kesempurnaan hanyalah milik sang Pencipta. Sehingga penulis membutuhkan saran maupun kritik terhadap kekurangan yang masih ada agar skripsi ini dapat berkembang dan lebih baik lagi.

Dengan demikian, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya dan penuh ketulusan hati dan keikhlasan yang terkhusus kepada kedua orang tua saya yang saya hormati, yang saya cintai dan saya hormai yang menjadi panutan hidup saya sampai sekarang yaitu Bapak Mulyadi dan Ibu saya Ati.M, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh cinta dan kehormatan sejak kecil hingga sekarang, dan segala apa yang telah diberikan kepada anak- anaknya, serta semua saudara yang selama ini turut membantu maupun mendukung dan juga mendoakan saya hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga atas apa yang telah kita lakukan di dunia Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Dan untuk orang tuaku yang saya hormati, cintai dan yang saya banggakan saya selaku anakmu dengan kerendahan hati saya, saya sangat meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan selama ini jika ada yang membuat hati orang tua saya kecewa, untuk orang tua saya doakan anakmu ini agar kelak mampu menjadi kebanggaan keluarga dan bisa membahagiakan orang tua, keluarga, dan berguna orang banyak Aamiin. Dan peneliti juga ingin berterimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, dalam hal ini Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H.Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Muhaemin, M.A., yang telah membina serta berupaya untuk meningkatkan mutu IAIN Palopo.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Sekaligus Penguji I dalam hal ini Dr. Takdir, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muhammad Rusln Abdullah, S.El., M.A., Wakil Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah memberikan arahan serta petunjuk agar skripsinya dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus Dosen PA Ekis 18 D, dalam hal ini Dr. Fasiha, S.El., M.El., Sekertaris Prodi Ekonomi Syarian, Abdul Kadir Arno, S.E., Sy., M.Si., beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selma ini banyak memberikn ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Muhammad Alwi S.Sy., M.E.I. selaku Pembimbing I dan Ustadz Muhammad Abdi Imam, S.E., M.Si., AK., CA. Selaku Penguji II yang telah memberikan ilmu yang luarbiasa melalui bimbingan, masukan, serta arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Madehang, S. Ag., M.Pd.,selaku kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo serta para Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini.
6. Serta para pemerintah daerah terkhusus pada Dinas PUPR, BPBD, Kelurahan Bone, dan Para Korban Banjir bandang serta pihak yang terkait, yang telah memberikan izin serta diterima dengan baik oleh para pihak yang terkait sehingga penulis sangat berterimakasih atas kontribusi pemerintah daerah dan

pihak yang terkait dalam mendukung kesuksesan skripsi ini dan juga penulis sangat berterimakasih telah diizinkan untuk melakukan penelitian

7. Kepada semua teman seperjuangan, yaitu Atnia, Indi Viana, Febi Rahayu, Yuni Anggraini, Wulan Andini, Harmia, Nurfani Singkali AL, Nurlatifa, Muhammad Yusfiandi dan teman bimbingan saya dan juga khususnya Group WA Ekis 18 D, Lutra Squad, dan juga group Kosa serta mahasiswa studi ekonomi syariah IAIN Palopo terkhusus Angkatan 2018 (Ekis D), yang selama ini membantu dan seloalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini tanpa kalian penulis tak bisa apa- apa terimakasih banyak atas semuanya selama ini
8. kepada pemerintah daerah khususnya Dinas PUPR Pribadi bapak Umardin M Nur dan seluruh anggota kerja Dinas PUPR yang telah memberikan kesempatan dan menerima peneliti dalam melakukan penelitian terkait kinerja pemerintahan, selain itu saya berterimakasih juga kepada BPBD khususnya Kepala bidang I bapak Mujahidin Sos, Kepala bidang II bapak Nurdin, dan kepala bidang III bapak Mujahid Serta semua anggota BPBD yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian, tak lupa pula saya berterimakasih kepada Pihak Kelurahan bone yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian di kantor tersebut dan juga untuk masyarakat yang telah berkontribusi dalam memberikan tanggapan terkait tentang penelitian yang saya lakukan. Maupun seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan penulis memohon

maaf sebesar besarnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu atas hal tersebut terimakasih.

9. Selain itu saya sangat bangga dan banyak- banyak bersyukur untuk diri sendiri yang mau bertahan, berjuang, berusaha sekuat dan semampu penulis lakukan demi untuk kebahagiaan keluarga, sangat berterimakasih untuk diri sendiri yang tidak menyerah meskipun banyak masalah, rasa lelah serta godaan yang datang untuk berhenti melanjutkan. untuk itu terimakasih karena sudah bertahan dan tetap kuat sampai titik sekarang ini.

Mudah- mudahan Skripsi ini bernilai ibadah, mempunyai kontribusi dan peranan yang besar bagi pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi acuan bagi pihak yang terkait dalam melakukan proses pembangunan dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Palopo, 26 Juli 2022



Penulis

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa'	S	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (Dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es Dan Ye
ص	Sad	S	Es (Dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (Dengan titik di bawah)
ط	TA	T	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	ZA	Z	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
اَوّ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah dan alifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	I dan garis di atas
اُو	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *usydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana* -

نَجَّيْنَا : *najjaina* -

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam* (ال) (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mūruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

مِثْرَةٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus

ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FiZilaLal-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dinūllah billah* -

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah* -

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadunillaa rasuul

Innaawwalabaitinwudi 'alinnaasi lallazii bi Bakkatamubaarakan

SyahruRamadhaan al-laziiunzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqizmin al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid MuhammadibnRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid MuhammadIbnu)

Nasr Hamid AbuZaid, ditulismenjadi: AbuZaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = *Shubhanahu Wa Ta'Ala*

SAW. = *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*

A.S. = *'Alaihi Al-Salam*

H = Hijrah

M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
Wr.	= <i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	= <i>Wabarakaatuh</i>
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
GBHN	= Garis Besar Haluan Negara
RPJMD	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
PUTRPKP2	= Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
DAS	= Daerah Aliran Sungai
BPBD	= Badan Penanggulangan Bencana Daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR TABEL/BAGAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Penelitian Yang Relevan	12
B. Deskripsi Teori.....	16
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Desain Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Instrumen Penelitian.....	31
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Teknik Pengujian Dan Keabsahan Data	33

G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	35
H. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

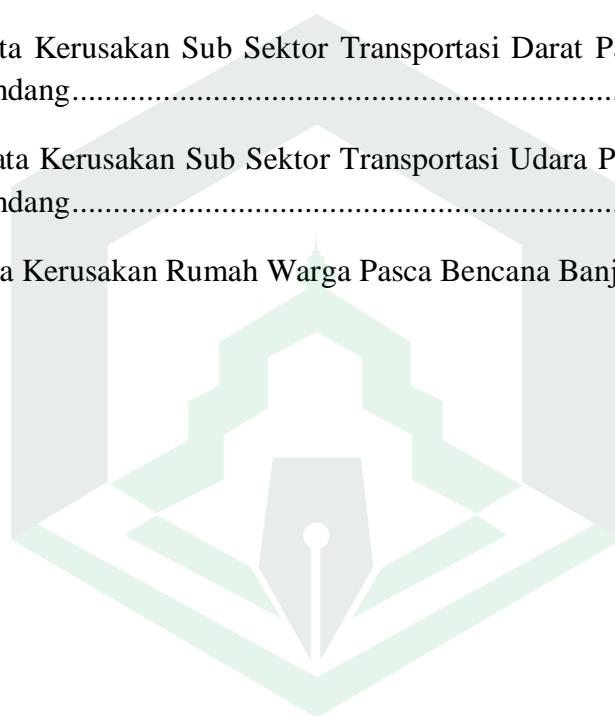
Kutipan ayat 1 QS Al-Baqarah/2: 11	17
Kutipan ayat 2 QS Ar-Rad/13:11	55



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Korban Jiwa dan Kerugian Material Bencana Alam Pasca Banjir Bandang.....	1
Tabel 2.1 Data Luas dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Luwu Utara	39
Tabel 3.1 Data Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur Pasca Bencana Banjir Bandang	57
Tabel 4.1 Data Kerusakan Sub Sektor Transportasi Darat Pasca Bencana Banjir Bandang.....	58
Tabel 5.1 Data Kerusakan Sub Sektor Transportasi Udara Pasca Bencana Banjir Bandang.....	60
Tabel 6.1 Data Kerusakan Rumah Warga Pasca Bencana Banjir Bandang...	64



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Observasi

Lampiran 4 : Surat Izin Meneliti

Lampiran 5 : Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Theeza Lestari, 2022. *“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Recovery dan Pemulihan Ekonomi Pasca Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Alwi S.sy., M.El.

Penelitian ini membahas terkait Recovery dan Pemulihan Ekonomi pasca banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, banjir bandang yang terjadi menyebabkan kerusakan terhadap material maupun non material, seperti rusaknya sawah, sarana dan prasarana seperti rusaknya drainase, saluran irigasi serta jembatan maupun UMKM yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian Kualitatif. Adapun subyek dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan kunci, yaitu Pemerintah Daerah khususnya Dinas PUTRPKP2, BPBD, dan Masyarakat yang yang terdampak banjir bandang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Adapun Hasil penelitian yang diperoleh Peneliti dimana Capaian target pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk pembangunan jangka pendek telah terealisasikan dan untuk pembangunan yang termasuk dalam jangka panjang masih dalam proses pemulihan, selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pemerintah daerah dalam melakukan proses kerja seperti faktor Anggaran, Sosial, faktor Lahan untuk pembangunan hantap. Pemerintah Daerah telah melakukan upaya semaksimal mungkin seperti pemerintah Daerah melakukan pengusulan kepada pemerintah pusat agar di berikan bantuan dana terhadap kegiatan yang masih banyak belum tercover oleh anggaran seperti melakukan Recoveri terhadap infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang rusak, selain itu dengan adanya percepatan pemulihan infratraktur maka social ekonomi masyarakat berjalan normal kembali.

Kata kunci : Recovery, Pemerintah, Pembangunan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara sederhana bencana dapat kita artikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan, keamanan serta gangguan ketertiban yang terjadi di kehidupan manusia yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah akibat dampaknya. Seperti banjir bandang yang telah terjadi di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang menyebabkan pemerintah daerah luwu utara harus turun tangan dalam pemulihan pembangunan daerah yang rusak akibat bencana alam yang terjadi, sehingga pemerintah sangat berperan penting dalam mengatasi masalah yang terjadi demi kesejahteraan masyarakatnya.¹ adapun beberapa kerugian dan korban jiwa akibat bencana banjir bandang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data kerugian material dan korban jiwa akibat bencana banjir bandang
Masamba

Indikator	Jumlah
Kerugian dan kerusakan	RP 582,85 Miliar
Korban jiwa:	<ul style="list-style-type: none">• Meninggal dunia sebanyak 38 jiwa• Luka- luka sebanyak 106 jiwa• Hilang sebanyak 10 jiwa

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Utara (11 Agustus 2020)

¹Muh. Aris Marfai. Suprpto Dibiyosaputro dan Hendi Fatchurohman, *Analisis Bencana Menunjang Pembangunan Daerah*, Edisi I (Jakarta: Grasindo dan Gajah Mada University Press, 2017), 1.

pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas pembangunan yang dapat dirasakan dikalangan masyarakat) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka adapun pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti:

1. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain- lain.
2. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
3. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah- rumah, tempat ibadah dan gedung kesehatan/ puskesmas.
4. Prasaran produksi seperti saluran air.

Dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara) 1998 disebutkan bahwa arah dan kebijakan pembangunan daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi suatu daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu penting dan sangat krusial untuk mewujudkan tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah sehingga keadilan dan pemerataan hasil pembangunan merata di seluruh tanah air.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dimana pemerintah daerah itu sendiri mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggara pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat daerah tidak hanya dalam hal kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pembangunan daerah ini harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal, sehingga keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.²

Seperti yang telah dijelaskan Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam pembangunan daerah di setiap wilayah sehingga peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengatasi pembangunan daerah yang ada di daerah itu sendiri. Dan dengan adanya pemerintah ini sangat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada di suatu wilayah/daerah termasuk dalam hal pembangua daerah itu sendiri. Dapat diketahui bahwa terciptanya pembangunan daerah yang

²Iskandar Kato et al., *Manajemen Pembangunan Daerah*, edisi 1 (Jakarta: Yayasan Kita Menlis, 2021), h. 1-6

sukses maka masyarakat yang ada di suatu daerah tersebut dapat merasakan kesejahteraan akibat dari pemerintah yang bertanggung jawab pada daerah itu sendiri.

Dengan demikian berbicara tentang pembangunan daerah maka memiliki keterkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah itu sendiri. Dalam penerapan pembangunan ekonomi daerah biasanya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi daerah tersebut, kebijakan daerah tertentu akan berbeda dengan kebijakan daerah yang lainnya karena setiap daerah mempunyai kelebihan dan kekurangan terhadap potensi kekayaan alam serta sumber- sumber yang lainnya, keputusan politik dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah itu sendiri. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah yang meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang artinya pemerintah harus dapat meningkatkan pendapatnya dengan menyediakan lapangan pekerjaan, kesehatannya, pendidikannya dan lain-lain termasuk rasa aman dan terlindungi dalam lingkungan hidup mereka.³

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara harus memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab para pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat yang terdampak banjir bandang selain itu juga kondisi masyarakat yang lainnya dengan mempercepat perbaikan sarana dan prasarana yang ada di Masamba, sehingga mereka dapat merasakan kesejahteraan seperti sebelumnya dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah. Secara umum tujuan dari pembangunan ialah mewujudkan suatu bangsa yang maju, mandiri, dan

³ R. Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah," *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 2 (2018): hal. 10, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>.

sejahtera lahir dan batin, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil makmur. Untuk mewujudkan sasaran tersebut.⁴

Pasca banjir bandang, pemerintah kabupaten Luwu Utara juga fokus dalam merehabilitasi dan merekonstruksi ketersediaan hunian bagi masyarakat korban banjir bandang. Bupati Luwu Utara menyatakan bahwa “Fokus ke pemulihan dan rekonstruksi. Untuk pemukiman, pemulihan dan juga rekonstruksi yang bersamaan dengan upaya apa saja yang akan dilakukan pemerintah daerah nantinya..”

Dengan itu Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menjadi salah satu prioritas arah kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu Utara tahun 2022. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026. Selain itu pemerintah daerah melakukan rapat paripurna dalam rapat paripurna tersebut pemerintah daerah berkomitmen untuk bersama-sama terus berupaya memulihkan kembali daerah yang terdampak banjir bandang.⁵

Selain itu pembangunan daerah dapat berkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak banjir bandang tersebut, dikarenakan adanya perbedaan situasi dan kondisi sebelumnya yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari akibat beberapa faktor yang dapat melatar belakangi perubahan tersebut seperti yang kita lihat sekarang ini yaitu faktor terjadinya banjir bandang yang dapat merusak seluruh lahan masyarakat

⁴Ali Kabul Mahi, dan Sri Indra Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2017), 29.

⁵<https://regional.kompas.com/read/2021/08/24/183247278/perbaikan-infrastruktur-rusak-akibat-banjir-bandang-bupati-luwu-utara-tahun>

baik perkebunan maupun persawahan serta infrastruktur lainnya, sehingga masyarakat harus melakukan relokasi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian pemerintah daerah juga berfokus pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat seperti pemerintah memperbaiki sarana perhubungan masyarakat seperti melakukan pembangunan jembatan di Desa Baloli dan Kamiri yang menjadi akses masyarakat untuk bertani selain itu juga jembatan tersebut terhubung dengan beberapa desa yang ada di pegunungan diantaranya Desa Maipi, Desa

Sumillin, Desa Lantang tallang, Desa Sepakat, Desa Pincara, Desa Tondok tua. Dengan demikian, jembatan yang ada di Desa Kamiri dan Baloli itu yang menjadi akses jalan beberapa desa tersebut. Sehingga pemerintah daerah mempercepat pembangunan jembatan pasca banjir dengan cepat agar akses masyarakat kecamatan masamba yang ada di pegunungan berjalan dengan lancar agar sosial ekonomi masyarakat dapat berjalan tidak ada hambatan.

Oleh karena itu, banjir akan menjadi masalah apabila banjir terjadi/ meluap di daerah pemukiman perkotaan, pertanian, kawasan industri dan lain sebagainya yang dapat memberikan dampak kerusakan dan dampak negatif terhadap lingkungan manusia. Seperti kerusakan prasarana (jalan, jaringan air bersih, fasilitas umum, dan prasarana lainnya), yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi serta menurunnya kualitas lingkungan. Sehingga pemerintah sangat berperan dalam melakukan perbaikan terhadap prasarana maupun fasilitas umum yang rusak akibat dari dampak banjir bandang yang telah terjadi.

Pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPUTRPKP2) Kabupaten Luwu Utara mengalami hambatan dan tantangan yang cukup besar. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan agar pembangunan infrastruktur dikabupaten Luwu Utara dapat tercapai sebagaimana yang menjadi Visi Dinas PUTRPKP2 “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Memadai, Berkualitas Merata, dan Terpadu”. Hal tersebut tercermin dari tercapainya beberapa tujuan dan sasaran strategis Dinas PUTRPKP2 Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan rencana strategis Dinas PUPR Kabupaten Luwu Utara 2016-2021. Sehingga capaian kinerja Dinas PUPR Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 dapat dikatakan cukup rendah dengan capaian kinerja tujuan sebesar 78,53% dan capaian kinerja sasaran strategis sebesar 52,11%. Pada memasuki tahun 2020 Dinas PUTRPKP2 Kabupaten Luwu Utara memperoleh pendapatan daerah sebesar RP. 648.396.880,- dari target Rp.745.000.000,- atau sebesar 87,03persen. Di sisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan seperti perlunya sistem perencanaan, penganggaran, pemulihan penyedia, keuangan dan pelaporan yang terintegrasi selain itu juga adanya faktor lain yang dapat menyebabkan pemerintah daerah tidak mencapai target dalam proses pembangunan pasca banjir bandang.⁶

Dengan itu apa yang telah diuraikan penulis akan melakukan penelitian terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dalam hal perbaikan infrastruktur maupun sarana dan

⁶ Rusydi Rasyid, *Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Utara 2020*, Cet I (Masamba:2021), h. 7&49.

prasarana yang rusak dan bagaimana pemulihan perekonomian dampak banjir bandang dan juga bagaimana pemerintah daerah dalam menjalankan perannya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam masalah pembangunan yang sedang terjadi dalam hal capaian maupun target dalam melakukan pembangunan pasca banjir apakah pemerintah daerah tersebut melakukan target dalam pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana atau tidak sehingga akan dilakukan penelitian terhadap masalah yang terkait.

B. Fokus Penelitian

Dapat diketahui bahwa di dalam fokus penelitian tersebut berisi tentang indikator atau permasalahan yang akan difokuskan oleh peneliti dalam melakukan penelitian secara langsung di lapangan guna memberikan arah serta memperjelas apa-apa saja yang akan diteliti nantinya. Dengan demikian hal tersebut dapat tersampaikan dengan jelas.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada indikator/ permasalahan yang ada seperti yang kita lihat di Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 13 Juli 2020 terjadi bencana alam banjir bandang yang dapat menyebabkan banyak kerugian dan kerusakan yang terjadi pasca banjir bandang sehingga peneliti ingin mengetahui target yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mencapai sasaran/ tujuannya dalam proses pembangunan. Serta saja faktor/ kendala yang menjadi penghambat dalam melakukan proses pembangunan pasca banjir bandang dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan pasca banjir bandang dalam hal pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemulihan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mencapai target/sasaran?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan proses pembangunan infrastruktur, sarana maupun sarana yang rusak dampak dari banjir bandang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pemulihan pembangunan pasca banjir bandang Kabupaten Luwu Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apakah pemulihan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mencapai target/sasaran?
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan proses pembangunan infrastruktur, sarana maupun sarana yang rusak dampak dari banjir bandang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pembangunan pasca banjir bandang Kabupaten Luwu Utara?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan di capai maka penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada para pembaca mengenai apa saja yang telah dituangkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai kontribusi dan sumbangsi pemikiran dalam khazanah keilmuan terkhusus kepada Pemerintah dan Masyarakat dalam hal Pembangunan Daerah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya masyarakat bisa berpartisipasi secara maksimal dalam Pembangunan Daerah.
- b. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat menjadi fasilitator dan mediator yang berkualitas untuk peningkatan dan kecepatan dalam pembangunan daerah pasca banjir bandang agar masyarakat kembali merasakan kesejahteraan.
- c. Bagi Daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam hal peningkatan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas kontribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.
- d. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan agar peneliti memiliki wawasan terkait apa yang diteliti sehingga mampu memberikan kontribusi

yang nyata kepada masyarakat ataupun daerah setempat. Selain itu juga peneliti mampu mengaplikasikan pengetahuannya selama kuliah



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk dijadikan sebagai acuan sebagai bahan perbandingan selain itu peneliti terhindar dari adanya kesamaan dengan penelitian orang lain.

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Favian Yafi' Naufal dengan judul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tanah Longsor di Kota Malang Provinsi Jawa Timur” dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa temuan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tanah longsor di kota malang belum optimal ditunjukkan pada tidak seluruh fasilitas yang rusak pasca bencana dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif.⁷

Sehingga persamaan dan perbedaan penelitian pertama yang dilakukan oleh Favian Yafi' Naufal dengan penelitian ini, dimana persamaannya terletak pada fokus Kebijakan Pemerintah dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap fasilitas yang rusak pasca banjir. Sedangkan berbeda dengan penelitian ini yaitu hanya pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menangani masalah tersebut dan juga hanya berfokus terhadap rekonstruksi

⁷ Favian Yafi' Naufal, “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tanah Longsor di Kota Malang Provinsi Jawa, <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9136>

dan rehabilitasi terhadap fasilitas yang rusak pasca banjir. Sedangkan penelitian ini nantinya berfokus pada pembahasan mengenai bagaimana upaya/ usaha yang telah dilakukan pemerintah Kota Masamba dalam menangani pembangunan daerah pasca banjir bandang serta apasaja masalah/ kendala yang dihadapi dalam membangun kembali Pembangunan Daerah Kota Masamba.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Rizana dan Zikri Alhadi, dengan judul “Efektivitas Peran BPBD Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana Banjir Di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam” dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat yang dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Agam sudah Efektif ditandai dengan adanya pembangunan terhadap rumah warga sebanyak 14 rumah tindakan rehabilitasi sebanyak 9 dan rekonstruksi sebanyak 5.⁸

Sehingga persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah persamaannya seperti upaya tenaga pemerintah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah turun tangan dalam membantu korban banjir seperti melakukan Rehabilitasi maupun Rekonstruksi terhadap kerusakan rumah warga. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini dimana penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Rizana dan Zikri Alhadi hanya berfokus pada

⁸ Wahyu Rizana and Zikri Alhadi, “Efektivitas Peran Bpbd Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana Banjir Di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 3 (2021): 193–99, <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2112>.

kinerja BPBD, dan penelitian terdahulu hanya berfokus pada perbaikan rumah warga yang terdampak banjir.

3. Ketiga, penelitian yang telah dilakukan oleh Dandi Darmadi, dengan judul “Komunikasi Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Di Masamba Kabupaten Luwu Utara”, dalam hasil penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan proses komunikasi pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Masamba. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah pusat dalam penanganan bencana berfokus pada penanganan para pengungsi yang terdampak banjir bandang pemulihan perumahan penduduk serta fasilitas umum. Akan tetapi ada permasalahan yang muncul dalam hal komunikasi pemerintahan yang terjadi pasca banjir bandang di Masamba pada saat itu pemerintahannya kurang komunikatif sehingga menyebabkan permasalahan seperti pendayagunaan para relawan dan distribusi logistik tidak merata dan kurang terarah akibat kurangnya komunikasi pemerintah pada saat itu.⁹
- Sehingga persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah persamaannya yaitu upaya pemerintah dalam penanganan bencana Alam pasca Banjir Bandang seperti penanganan para pengungsi, pemulihan perumahan/ sarana penyediaan hunian bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang serta fasilitas umum, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada pendeskripsian proses komunikasi

⁹ Dandi Darmadi and Rasyid Thaha, “Analisis Kualitas Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Selatan,” *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8, no. 1 (2019): 75, <https://doi.org/10.31314/pjia.v8i1.291>.

pemerintah kabupaten Luwu Utara dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Masamba.

4. Ke empat, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Hanun Zayain, Slamet Muchsin, dan Retno Wulan Sekarsari, dengan judul “Evaluasi Kebijakan Bencana Alam (Studi Kasus Penanganan Pasca Bencana Banjir di SDN 1 Bendoroto, Kecamatan Munjangan, Kabupaten Trenggalek), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemkab Trenggalek dalam dalam penanganan pasca bencana di SDN 1 Bendoroto ada beberapa tahap. Yang pertama melakukan peninjauan lokasi yang terdampak bencana banjir agar dapat mengetahui apasaja yang akan ditindak lanjuti. Kemudian pemerintah melakukan pendirian sekolah darurat dalam sementara waktu sampai ada kebijakan selanjutnya dan yang terpenting dalam kebijakan ini adalah relokasi dan rekontruksi sekolah sebagai alternatif pemecahan masalah. Sumber pendanaan yang digunakan untuk proses penanganan pasca bencana banjir tersebut bersumber dari APBN, APBD, dan CSR Bank Jatim.¹⁰ Sehingga persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah persamaannya yaitu adanya keterlibatan pemerintah dalam pembangunan seperti membangun sekolah darurat dalam sementara waktu, dan memberikan pendanaan dari APBN, APBD, dan CSR Bank Jatim itu sendiri. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu dalam

¹⁰ Nabila Hanun Zayain, dkk, “Evaluasi Kebijakan Bencana Alam (Studi Kasus Penanganan Pasca Bencana Banjir di SDN 1 Bendoroto, Kecamatan Munjangan, Kabupaten Trenggalek),” *Jurnal Respon Publik* Vol. 14, No. 1 (2020): 50, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=upaya+pemerintah+dalam+mengatasi+pembangunan+daerah+pasca+banjir+bandang&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DswW5M2jf2j4J

penelitiannya memfokuskan pada evaluasi kebijakan bencana alam seperti manajemen bencana, dan keterlibatan aktor kebijakan sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan daerah pasca banjir bandang.

B. Deskripsi Teori

1. Pemerintahan

Pemerintah merupakan organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan serta pandangan kedepan. Selain itu pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk bangsa dan negaranya sesuai tugas dan fungsi pemerintahan itu sendiri.

Adapun fungsi pemerintahan itu sendiri yaitu yang pertama, pemerintah berperan menciptakan kondisi yang mempermudah pembangunan ekonomi tetapi tidak berperan aktif didalamnya, kebijakan ini dapat berarti seperti memberikan jaminan kestabilan sosial dan mendukung berbagai jenis pembangunan perdagangan dan industri yang dilakukan oleh pengusaha swasta, selain itu pemerintah juga secara aktif mengatur proses pembangunan hingga taraf tertentu.¹¹

Dengan demikian pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan penebangan pohon secara liar tetapi melakukan penghijauan dengan cara melakukan penanaman pohon di tepi sungai yang rawan terkena banjir atau tempat yang sering terkena banjir, selain itu juga pentingnya bagi kesadaran seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah

¹¹ Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, Edisi 1 (Malang, UB Press, 2018), h. 2

sembarangan agar lingkungan tidak rusak atau tercemar akibat limbah sampah yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Dan Allah melarang kita semua dalam melakukan kerusakan dimuka bumi ini yang telah di jelaskan dalam QS, Al-Baqarah/2:11.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."¹²

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mempunyai hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya hubungan tersebut mempunyai maksud dan tujuan tersendiri dalam menyelenggarakan apa yang telah diamanatkan oleh undang- undang dasar 1945 alinea IV yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.”¹³ Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa dalam pemerintahan itu harus melakukan tugas- tugasnya sesuai dengan pe raturan yang telah dibuat berdasarkan undang- undang 1945 agar semua pembangunan yang dilakukan dapat berguna bagi bangsa dan masyarakat yang ada didalam suatu negara tersebut dapat merasakan kesejahteraan.

¹² Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim, 2014), h. 3

¹³Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, Penerbit WR, 2018), h.

Jadi kata pemerintah adalah kekuasaan untuk memerintah pada suatu negara atau daerah. ¹⁴ dapat diketahui bahwa pemerintahan merupakan suatu pemimpin yang ada didalam suatu negara yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mengatur bangsa dan negaranya agar peraturan yang ada dalam suatu negara yang di buat oleh pemerintah mempunyai tujuan yang terarah dan disepakati bersama masyarakat yang ada dalam suatu negara itu sendiri.

Sehingga pemerintah mempunyai peranan sebagai fasilitator, regulator, dinamisator dalam penanggulangan banjir. Oleh karena itu pemerintah sangat berperan dalam pembangunan daerah ketika terjadinya bencana alam yang terjadi dan dapat menyebabkan kerusakan pada daerah tersebut.

2. Pembangunan Daerah

Dapat diketahui bahwa pembangunan ialah upaya saling berkaitan yang dapat menciptakan keadaan yang menyediakan alternatif yang sah bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Secara umum tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin, yang dijadikan sebagai landasan dalam tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur. Dan adapun proses dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nantinya yaitu:

a. Proses Teknokratik

¹⁴Haudi, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Edisi 1 (Sumatra Barat, CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 1

Merupakan perencanaan yang dilakukan oleh perencanaan professional, maupun lembaga/ unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan pembangunan itu sendiri. Pendekatan teknokratis ini dalam perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga metode dan kerangka berfikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis/ terurut terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan metode dan kerangka berfikir ilmiah.

b. Proses partisipatif

Perencanaan yang dapat melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) antara lain melalui pelaksanaan musrenbang pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

c. Proses politik

Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan pembangunan daerah nantinya dikarenakan dapat menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk visi, misi, dan program yang ditawarkan presiden/kepala daerah yang terpilih. Dimana pendekatan politik yang dimaksudkan adalah program- program pembangunan.

3. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun manfaat dan tujuan dari perencanaan pembangunan daerah yaitu dapat dijadikan sebagai penyusunan suatu rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya alam dan manusia serta peluang ekonomi yang ada, sehingga dapat memungkinkan dapat di tangkap secara cepat pembangunan seperti apa yang akan di lakukan nantinya sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Dimana manfaat yang diharapkan nantinya adalah terjadinya peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan.¹⁵

Sehingga dapat diketahui bahwa perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk dilakukan sebelum dilaksanakannya pembangunan agar kita dapat mengetahui seperti apa pembangunan yang akan dilakukan dan bagaimana proses pembangunannya agar pembangunan daerah itu dapat lebih terarah, seperti pembangunan daerah pasca banjir bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara Tersebut. Sebelum pemerintah mengatasi pembangunan daerah pasca banjir bandang tersebut perlunya untuk melakukan perencanaan pembangunan itu sendiri agar pembangunannya dapat tereliasisakin dengan baik dan terarah.

Dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya untuk daerah itu sendiri yang mempunyai fungsi untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah

¹⁵Ali Kabul Mahi dan Sri Indra Trigunarso, *perencanaan pembangunan daerah*, Edisi I (Jakarta, Kencana, 2017), h. 48

tersebut serta untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.¹⁶

Menurut Kodoatie dan Sjarief, “Indonesia termasuk negara yang memiliki sejarah bencana dan salah satunya adalah banjir. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi alam yang berubah-ubah, selain itu seperti penebangan hutan dan lain sebagainya yang tidak terkontrol sehingga hal tersebut dapat memperburuk keadaan dan akhirnya banjir terjadi.”¹⁷ dengan demikian curah hujan yang tidak ada hentinya dapat mengakibatkan banjir seperti yang kita lihat pada Kecamatan Masamba 13 Juli 2020 lalu terjadi bencana Alam Banjir Bandang yang memakan korban jiwa dan Kerusakan bangunan/ rumah warga maupun sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah sehingga menyebabkan banyak kerugian yang dialami pada saat itu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana alam dapat didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam maupun faktor nonalam dan juga bisa faktor dari ulah manusia itu sendiri, yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana alam tersebut dapat berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, erosi pantai, angin topan, dan tanah longsor. Sehingga hal tersebut pemerintah harus mengimbau kepada masyarakat ketika sudah terjadi

¹⁶ Mudrajat Kuncoro, *perencanaan Pembangunan Daerah*, Edisi I (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 4

¹⁷ Syaifudin, dalam kutipan Kodoatie dan Sjarief *Banjir Jakarta Suatu Pendekatan Triple Helix*, Edisi I (Jakarta Timur, UNJ PRESS, 2021), h. 1-2

tanda- tanda terjadinya bencana alam agar masyarakat dapat selamat dan mengurangi tingkat korban jiwa.¹⁸

4. Teori Recoveri (Pemulihan)

Upaya dalam mengurangi resiko (mitigasi) ada yang dapat dilakukan oleh pemerintah, ada yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat, dan ada juga yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan individu. Yang dapat dilakukan untuk upaya mengurangi resiko bencana, semua individu maupun kelompok dapat berperan, dengan perannya masing- masing, dalam mengurangi risiko banjir ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat:

a. Kegiatan fisik (struktur)

Upaya mengatasi masalah banjir sampai saat ini masih mengandalkan pada kegiatan fisik (struktur) seperti membangun sarana dan prasarana pengendali banjir atau memodifikasi kondisi alamiah sungai sehingga membentuk suatu sistem pengendali banjir. Langkah tersebut diterapkan hampir diseluruh negara- negara di dunia yang mengalami masalah banjir. Adapun berbagai jenis kegiatan fisik (struktur) yang mempunyai manfaat seperti pembangunan waduk atau bendungan pengendali banjir, yang sekaligus untuk irigasi pertanian, pembangkit listrik, pariwisata dan sebagainya, selain itu juga melakukan pembangunan seperti tanggul dipinggir sungai pada titik- titik daerah rawan banjir. Tujuannya adalah dapat mencegah meluapnya air pada tingkat ketinggian tertentu kedaerah rawan banjir, pembangunan kanal- kanal yang bertujuan

¹⁸Muh. Aris Marfai, *Analisis Bencana Menunjang Pembangunan Daerah*, Edisi I (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2021), h. 1-2.

menurunkan tingkat ketinggian air di daerah aliran sungai dengan menambah dan mengalihkan arah aliran sungai, melakukan pembangunan interkoneksi antar sungai, yang bertujuan untuk merendahkan tingkat ketinggian muka air sungai, pembangunan polder yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memindahkan air dari tempat yang mempunyai elevasi yang rendah ke tempat yang mempunyai elevasi yang lebih tinggi dengan menggunakan mesin pompa, dan juga melakukan penelusuran aliran sungai, yang bertujuan untuk melancarkan dan mempercepat aliran air untuk mencapai muara.

b. Kegiatan non-struktur

Pada kegiatan ini mempunyai tujuan untuk menghindari dan juga merekam besarnya masalah yang ditimbulkan oleh banjir, seperti dengan cara mengatur pembudidayaan lahan di dataran banjir dan di DAS. Untuk itu pelaku utama dari kegiatan ini adalah masyarakat. Dimana upaya non- struktur ini dapat berupa; konservasi tanah dan air hulu sungai untuk merekam besarnya aliran permukaan, mengendalikan besarnya debit puncak banjir, dan pengendalian erosi untuk mengurangi pendangkalan/ sedimentasi di dasar sungai. Kegiatan ini merupakan gabungan antara rekayasa teknik sipil dengan teknik agro.

- 1) Upaya pengendalian air tersebut antara lain dapat dilakukan dengan membuat terasering, bangunan terjunan, dan penahan sendimen, pengendali sendimen, kolam retensi, melakukan penghijauan dan reboisasi serta membangun sumur resapan.
- 2) Selain itu pengelolaan daerah banjir berupa penataan ruang dan rekayasa di daerah banjir yang diatur sedemikian rupa agar risiko/kerugian bencana yang timbul apabila tergenang banjir, minimal rekayasa dalam bidang bangunan antarlain berupah rumah tipe panggung, rumah susun, jalan layang, jalan dengan perkerasan beton, peraturan penggunaan rumah/ gedung bertingkat, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa di bidang pertanian dapat berupa pemilihan jenis tanaman yang tahan genangan.
- 3) Selanjutnya yaitu penanggulangan banjir untuk menekan besarnya bencana dan mengatasinya secara darurat. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan *satkorlak* penanggulangan bencana, yang dilaksanakan sebelum kejadian banjir (meliputi perondaan dan pemberian peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir), pada saat itu kejadian banjir dapat berupa upaya penyelamatan, pengunsian, penutupan tanggul yang bocor dan limpas, maupun kegiatan pasca banjir yang berupa penanganan darurat dan perbaikan terhadap kerusakan akibat banjir itu sendiri.

- 4) Penerapan sistem perkiraan dan peringatan dini untuk menekan besarnya bencana bila banjir benar- benar terjadi. Upaya ini untuk mendukung kegiatan penanggulangan banjir.
- 5) Pengamanan terhadap banjir yang dilakukan sendiri baik oleh perorangan, swasta maupun oleh kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah banjir secara lokal, misalnya dikelompok pemukiman/ real estat,, industri, antara lain dengan membangun tanggul keliling, polder dan juga pompanisasi.
- 6) Pemetaan daerah banjir diperlukan, peta mencakup area- area yang terkena banjir, frekuensi banjir, analisa frekuensi dan laporan- laporan kerusakan, peta- peta lereng maupun peta yang terkait lainnya seperti penggunaan lahan, vegetasi, kepadatan penduduk dan peta- peta infrastruktur.
- 7) Melakukan pengawasan penegak hukum terhadap peran masyarakat dalam menaati ketentuan penggunaan tata ruang dan pola pembudidayaan daerah banjir dan DAS hulu, untuk menghindari terjadinya penyempurnaan dan pendangkalan alur sungai akibat sampahpadat maupun bangunan/ hunian dan tanaman di bantaran sungai.
- 8) Penetapan sempadan sungai yang di dukung dengan penegakan hukum, pada setiap sungai harus di ditetapkan batas sempadanya yang diatur dengan peraturan daerah.

9) Penyuluhan dan pendidikan masyarakat lewat berbagai media tentang banjir dalam rangka meningkatkan pemahaman, kepedulian dan juga peran masyarakat.

10) Penanggulangan kemiskinan. Masyarakat miskin di perkotaan banyak yang terpaksa menghuni bantaran sungai yang seharusnya bebas hunian karena sangat membahayakan keselamatan jiwa. Demikian pula masyarakat petani lahan kering di DAS hulu, pada umumnya miskin sehingga kesulitan untuk melaksanakan pola bercocok tanam yang dapat menunjang upaya konservasi tanah dan air.

c. Kombinasi Upaya Struktur dan Non- Struktur

Masing- masing jenis upaya struktur berupa prasaran fisik dapat berdiri sendiri ataupun dikombinasikan dengan upaya non struktur sehingga dapat membentuk satu kesatuan sistem pengendali banjir yang menyeluruh dan terpadu. Dimana kombinasi dari kedua jenis upaya tersebut berfungsi untuk memperkecil besarnya masalah banjir walaupun kita tidak dapat membebaskan diri dari masalah banjir secara mutlak. Kondisi dan permasalahan pada setiap sungai selalu berbeda- beda, sehingga penetapan sistem pengendali banjir yang optimal pada setiap sungai harus melewati suatu kajian yang menyeluruh dengan membandingkan alternatif kemungkinan.

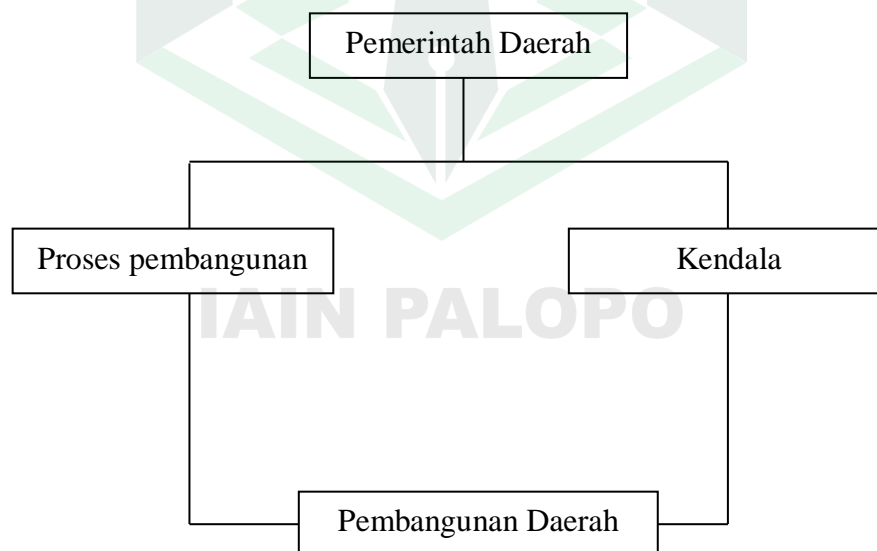
d. Usaha Pemulihan yang dilakukan Pasca Banjir

- 1) Tindakan- tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat/ perorangan; seperti membersihkan rumah/ tempat tinggal, bersama warga yang lain dalam membantu memperbaiki lingkungan sekitar agar tidak terjadi lagi bencana alam seperti banjir bandang dengan melakukan penghijauan di daerah aliran sungai serta tidak membuang sampah sembarangan dan juga tidak melakukan penebangan hutan secara liar sehingga lingkungan sekitar dapat terjaga dan tetap asri serta bebas dari bencana banjir.
- 2) Tindakan yang harus dilakukan oleh pihak berwenang/ pemerintah diantaranya seperti:
 - a) Mengadakan tempat perlindungan sementara/ pengungsian.
 - b) Memberi bantuan makanan dan medis- medis untuk para pengungsi dan para korban.
 - c) Menyediakan air bersih untuk pengungsi.
 - d) Menyediakan sanitasi untuk para korban yang berada di pengungsian.
 - e) Melakukan pengawasan terhadap bahaya penyakit menular.
 - f) Melakukan perbaikan dan rekontruksi bagi ilayah yang terkena banjir.
 - g) Pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja.
 - h) Membantu pemulihan pertanian lewat pinjaman- pinjaman distribusi peralatan dan perlengkapan pertanian dan juga hewan.
 - i) Membantu pemulihan bisnis- bisnis kecil dan lain sebagainya.

- j) Serta melakukan kembali penghijauan kembali untuk lahan-lahan gambul¹⁹

Dengan itu dapat kita pahami bahwa masyarakat ataupun seluruh makhluk hidup di dunia ini harus memiliki kesadaran untuk tidak melakukan kerusakan di bumi ini dengan cara tdk mencemari lingkungan dan juga tdk melakukan kerusakan di hutan dengan penebangan hutan secara liar. Selain itu juga bagi pihak yang berwenang/ pemerintah pentingnya untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan itu sendiri dengan mengarahkan masyarakatnya ke arah yang lebih baik serta melakukan pemulihan terhadap sarana, prasarana serta infrastruktur yang rusak akibat dari bencana banjir bandang yang telah terjadi.

C. Kerangka Pikir



Alur kerangka fikir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah merupakan organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung

¹⁹ Ella Yulaelawati, dan Usman Syihab, *Mencerdasi Bencana*, Edisi I (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), h. 17-25

jawab dan kewenangan yang mempunyai pandangan kedepan. Serta pemerintah bertugas dalam pengendalian dan juga memberikan alat sarana dan prasarana dalam mengatasi pembangunan daerah pasca banjir bandang.



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Secara umum penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu.²⁰

B. Desain penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif, pengolahan data yang bersifat gagasan yang di kemukakan para ahli kemudian dianalisis, juga, menggunakan metode kualitatif yaitu pengolahan data yang bersifat kasus atau fakta- fakta sosial, dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan, metode kualitatif, yaitu pengelolaan data yang bersifat uraian,

²⁰ V. Wiratna Sujarweni dalam kutipan Bog dan dan Taylor, *metodologi penelitian* (jl. Wonosari Km.6 Demblaksari Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2020), h. 19

argumentasi dan paparan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti yang kemudian dianalisis dan sifat penelitian survei.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah terdapat pada bagaian Pemerintahan itu sendiri di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPUTRPKP2) dan Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Pemerintahan Daerah yang terkait. Alasan Peneliti memilih bagian Pemerintahan ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah pembangunan yang terjadi pasca banjir bandang seperti proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data atau hasil yang didapatkan.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek atau objek dari mana data diperoleh. Suharsimi dalam Jonhi Dimiyati menjelaskan bahwa sumber data secara garis besar ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber data primer

Data primer adalah data asli yang langsung diperoleh dari sumbernya guna menjawab masalah penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer bersumber dari beberapa informan penelitian yaitu dari pihak Pemerintahan Daerah itu sendiri yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

(DPUTPKP2), BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Pemerintah Daerah yang terkait.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap data primer untuk mendukung kredibelnya suatu penelitian. Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak lain.²¹ Sumber data sekunder dapat berupa surat-surat pribadi, dokumen-dokumen resmi, notula rapat dan sebagainya.²² Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber dari dokumentasi, dokumen, data-data dan beberapa referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam metode penelitian kualitatif yang menjadi instrumen yang utama adalah peneliti itu sendiri, sehingga yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah seperti menyiapkan pedoman wawancara, alat tulis, alat rekam, dan juga dokumen atau literasi.

IAIN PALOPO

²¹ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia: Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 27, 32. https://www.google.co.id/books/edition/Riset_SDM_Cara_praktis_mendeteksi_dimensi/nxsymOE7XmgC?hl=id&gbpv=1&dq=data+primer+adalah&pg=PA32&printsec=frontcover

²² Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Edidi ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 143.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa strategi dalam pengumpulan data di antaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi langsung, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan menggunakan teknik pengamatan atau observasi.²³

Observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan membuat daftar isian sebelumnya ataupun dilakukan secara spontan.

Pada dasarnya observasi digunakan peneliti untuk mengamati perubahan fenomena sosial yang ada kemudian peneliti akan melakukan penilaian terhadap perubahan fenomena yang terjadi.²⁴ Dalam mengadakan observasi peneliti akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terkait dengan aktivitas di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti akan mencatat atau merekam dengan baik segala aktivitas yang ada di lapangan.²⁵

Pada bagian observasi ini, peneliti mengamati bagaimana pemerintah daerah dalam menangani masalah pasca bencana banjir bandang serta seperti apa upaya pemerintah daerah dalam menghadapi faktor/ kendala dalam proses pembangunan. Dengan demikian adanya kontribusi pemerintah pusat dan

²³ Sukirman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*, Cet. 1 (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2015), h. 242.

²⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Cet. 3 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 63.

²⁵ John W. Creswell, *Reseach Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi ke-4 (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2019), h. 254.

Pihak Lainnya yang terkait memberikan dana bantuan kepada pemerintah daerah sehingga jangka proses kerja pembangunan yang ada di Luwu Utara akan di percepat dan untuk daerah yang terdampak pembangunannya akan di slesaikan pada tahun ini 2022 akhir bulan 12.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara digunakan yaitu bertanya langsung kepada informan yang terkait, apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan guna mendapatkan informasi dari responden secara mendalam dan untuk menemukan permasalahan yang diteliti. Teknik ini didasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau dengan kata lain adalah keyakinan diri.²⁶ Peneliti melakukan wawancara secara *face to face* kepada pihak yang menjadi informan dalam penelitian. Selain itu, wawancara juga dapat dilakukan dengan telepon atau terlibat langsung dengan wawancara dalam kelompok (*focus group interview*). Wawancara seperti ini umumnya bersifat tidak terstruktur dan terbuka serta memerlukan pertanyaan yang dirancang guna mendapatkan opini dan pandangan dari partisipan.²⁷

Prosedur wawancara yang terstruktur terlebih dahulu dilakukan dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan yang tertulis di lembaran kertas dan sifatnya terbuka sehingga para informan mengetahui jika tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, h. 465.

²⁷ John W. Creswell, *Reseach Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi ke-4 (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2019), h. 254.

wawancara secara langsung sehingga peneliti juga mampu menghasilkan data terstruktur dari informan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumen digunakan sebagai suatu pelengkap dari teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Dokumen adalah suatu catatan terhadap peristiwa yang telah terjadi atau berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya lainnya. Dokumen dalam bentuk tulisan dapat berupa cerita, catatan harian, biografi, sejarah kehidupan, kebijakan dan peraturan. Sedangkan dokumen dalam bentuk gambar seperti sketsa, foto, gambar hidup dan lain sebagainya. Dan dokumen yang berbentuk karya contohnya adalah karya seni berupa film, patung dan lain-lain. Penelitian yang dilakukan bila dilengkapi dengan bukti berupa dokumen akan menunjukkan semakin kredibelnya suatu penelitian.²⁸

Hal ini bertujuan untuk agar dokumen- dokumen tersebut dapat memerikan kontribusi atau sebagai alat kelengkapan yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan yang di teliti dan kredibelnya suatu penelitian.

G. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan Uji Kredibilitas (Credibility) Dalam penelitian kualitatif, informasi bisa dinyatakan kredibel apabila persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebetulnya terjadi di lapangan/ pada

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, h. 476.

objek yang diteliti. Dilapangan ditemukan bahwa terdapat faktor/ kendala yang menjadi penghambat pemerintah daerah dalam melakukan proses pembangunan, sehingga kasus inilah yang hendak akan dikaji informasinya oleh peneliti secara rinci. Dimana Uji Kredibilitas terdiri atas beberapa macam yakni perpanjangan pengamatan, meningkatkan intensitas, trigulasi, analisis permasalahan negative, memakai bahan rujukan serta member check. Tetapi peneliti hanya memakai metode trigulasi dikarenakan trigulasi ini diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan melalui pengecekan informasi lewat sumber, metode, dan waktu yang digunakan dalam proses penelitian.

H. Teknik Analisis data

Analisis data dimulai sejak peneliti telah merumuskan dan menjelaskan apa yang menjadi masalah penelitian baik itu sebelum turun ke lapangan maupun pada saat berlangsungnya proses penelitian bahkan sampai pada tahap akhir penulisan hasil dari penelitian. Beberapa teknik analisis data yang digunakan adalah:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti peneliti membuat rangkuman, kemudian memilih hal-hal pokok yang fokus kepada hal-hal yang penting saja untuk mencari tema dan pola serta membuang yang tidak diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh data yang memberikan gambaran lebih jelas sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data merupakan proses berfikir yang memerlukan kecerdasan, keluasan wawasan yang tinggi sebab untuk mereduksi data

peneliti akan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai dimana focus utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuannya.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Namun, yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk narasi singkat. Penyajian data ini dimaksudkan agar data yang terorganisasi, tersusun dalam pola akan semakin memudahkan peneliti untuk memahami data yang diperoleh, memahami fenomena yang terjadi dan dapat menentukan rencana kerja selanjutnya.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan penarikan sebuah kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin saja dapat menjawab masalah penelitian di awal ataupun juga tidak. Hal ini dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif hanya bersifat sementara dan akan berkembang setelah dilakukannya penelitian secara langsung di lapangan.²⁹

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, h. 485-492.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Profil wilayah Kabupaten Luwu Utara

Wilayah Kabupaten Luwu Utara sebelumnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Luwu, yang kemudian dimekarkan pada tahun 1999 menjadi 2 wilayah daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara. Kemudian pada Tahun 2003, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Sampai pada tahun 2017, Kabupaten Luwu Utara telah memiliki 12 wilayah kecamatan dan 173 desa/ kelurahan. Pada awal tahun 2018, pihak legislative dan eksekutif telah mengesahkan ranperda tentang pembentukan tiga wilayah kecamatan pemekaran menjadi peraturan Daerah, sehingga dengan demikian kabupaten Luwu Utara telah memiliki 15 Wilayah Kecamatan.

Dimana luas wilayah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan data BPS Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58 kilometer persegi. Kabupaten Luwu Utara terletak dibagian utara provinsi Sulawesi Selatan, dengan itu Masamba sebagai ibu kota Kabupaten, dengan jarak tempuh kurang lebih 450 km dari Kota Makassar, sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi Geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada posisi $01^{\circ} 47' 46''$ - $120^{\circ} 37' 44''$ Bujur Timur.

Tabel 2.1
Luas dan Pembagian Daerah Administrasi Kab. Luwu Utara

Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Desa/Kelurahan
Sabbang	424,11	10
sabbang Selatan	100,97	10
Baebunta	203,16	11
Baebunta Selatan	92,09	10
Masamba	1.068,85	20
Mappedeceng	275,50	15
Seko	2.109,19	12
Rongkong	686,50	7
Rampi	1.565,65	6
Malangke	229,70	14
Malangke Barat	214,05	13
Sukamaju	208,21	14
Sukamaju Selatan	47,27	11
Bone- Bone	127,92	11
Tanalili	149,41	10
Kab. Luwu Utara	7502,58	174

b. Sejarah pendek Dinas PUPR

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan sebagai Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam rangka melaksanakan kewenangan teknis di bidang pekerjaan umum, karena itu penyusunan Rencana strategis (Resentra) Tahun 2016-2021 merupakan kebijakan untuk merumuskan berbagai rencana strategis, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Sebagai Lembaga Pemerintahan yang anggarannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka Dinas PUTRKP2 wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pemangku Kepentingan. Laporan Kinerja di susun mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk dan teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Maksud penyusunan laporan kinerja tahun 2021 adalah sebagai bentuk penanggung jawaban Kepala Dinas PUTRKP2 kepada Bupati atas pelaksanaan program/ kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/ target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja dan sasaran Dinas PUTRKP2 selama tahun 2021, dimana capaian hanya sebesar 30,85%

atau sekitar Rp.110.990.632.252,- Rendahnya realisasi anggaran pada tahun 2021 diakibatkan karena tidak terserapnya anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan maupun sasaran strategis dapat dikatakan Dinas PUTRPPKP2 telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Hal yang sama terjadi pada pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas PUTRPPKP2. Masing- masing program dan kegiatan tersebut memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dari realisasi anggaran.

c. Visi-Misi Dinas PUTRPPKP2

Visi: “Tersedianya infrastruktur pekerjaan umum yang memadai, berkualitas, merata dan terpadu.”

Misi: “

- 1) Mewujudkan penataan ruang yang nyaman dan berwawasan lingkungan, mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optimal
- 2) Mewujudkan aksesibilitas dengan pembangunan
- 3) Meningkatkan serta pemeliharaan jaringan jalan yang berkualitas, terpadu, merata dan berkelanjutan
- 4) Mewujudkan kualitas penyehatan lingkungan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum
- 5) Mewujudkan kualitas penyehatan lingkungan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum
- 6) Mewujudkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

- 7) Serta Mewujudkan kualitas layanan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

d. Struktur Organisasi

Sekretariat terdiri dari

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
- 3) Subbagian Keuangan

Bidang Bina Marga terdiri dari

- 1) Seksi perencanaan Teknis dan Evaluasi
- 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

Bidang Cipta Karya terdiri dari

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian
- 2) Seksi Penataan Bangunan
- 3) Seksi Pengembangan SPAM dan PLP

Bidang Penataan Ruang terdiri dari

- 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 2) Seksi Tata Ruang
- 3) Seksi Pertanahan

Bidang Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari

- 1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
- 2) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air
- 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari

- 1) Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi
- 2) Seksi Peraturan Jasa Konstruksi
- 3) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

Bidang Kawasan Pemukiman terdiri dari

- 1) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman
- 2) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
- 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan terdiri dari

- 1) Seksi pemantauan dan Evaluasi Perumahan
- 2) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan
- 3) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan

e. Sejarah pendek BPBD

Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 24 Januari 2007 menyampaikan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengurangi resiko bencana . selanjutnya, pada tanggal 26 April 2007 disahkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana. Kedua perangkat hukum tersebut diatas merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi resiko bencana dan membangun masyarakat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Selain itu, keduanya juga merupakan landasan hukum terbentuknya lembaga Penanggulangan Bencana baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utaramerupakan dasar hukum terbentuknya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara. Pembentukan BPBD Kabupaten Luwu Utara bertujuan untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang saat ini telah disesuaikan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) periode 2020-2024 dimana arah kebijakan kepada peningkatan ketangguhan bencana menuju kesejahteraan yang berketahanan untuk pembangunan berkelanjutan khususnya di daerah Kabupaten Luwu Utara Selain itu, BPBD Kabupaten Luwu Utara juga berkewajiban merefleksikan kebutuhan spesifik terhadap penanggulangan bencana dengan mengacu pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara periode 2021-2026. Seluruh tindak lanjut yang dimaksud kemudian akan di tuangkan ke dalam Resentra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara periode 2021-2026.

f. Visi- Misi BPBD

Visi: “Terwujudnya Penanggulangan Bencana Yang Cepat, Tanggap, Terpadu, Menyeluruh dan Berkeadilan.”

Misi:

- 1) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu terkoordinasi dan menyeluruh
- 2) Membangun sistem penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- 3) Melindungi kabupaten luwu utara dari ancaman melalui pengurangan resiko bencana

g. Struktur Organisasi

Kepala Badan/ EX-OFFICIO

Sekertaris Daerah

Unsur Pengarah/ Instansi

Profesional/ Ahli

Kepala Pelaksana

Drs. Muslim Muchtar, M. Si

Sekertaris

Andril Dharsyah F, S. STP

Kasubag Program dan Perundang- Undangan

Yusdian, S. Hut

Kasubag Kepegawaian dan Keuangan

Muhlis Baso, S. Sos

Kasubag Umum dan Rumah Tangga

Mustaming, SE

Kabid I Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Mujahidin, S. Sos

Kasubbid Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Irwan, ST., M. Si

Kabid II Penanggulangan Darurat dan Logistik

Nurdin, S. Sos

Kasubbid Penyelamatan Evaluasi dan Penanggulangan Pengungsi

Akram Santiung, ST

Kasubbid Sarana dan Prasarana Darurat Logistik

Drs. Syahrul

Kabid III Rehabilitasi dan Rekonstruksi

H.Aнди Awaluddin, ST, MT

Kasubbid Rehabilitasi

Ismar Sukma, ST

Kasubbid Rekontruksi

Mujahid, ST

2. Pemulihan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mencapai target atau sasaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Umardin M Nur dan Mujahidin yang mewakili Dinas PUPKP2 dan BPBD Menyatakan bahwa

“tidak ada penetapan target yang pasti untuk pemulihan pembangunan pasca banjir bandang tetapi pemerintah daerah akan mengusahakan penyelesaian proses pembangunan 2 tahun setelah terjadinya bencana yaitu tahun 2022 akhir bulan Desember mendatang untuk jangka pendek dan untuk jangka pnjang akan diselesaikan beberapa tahun ke depan, dimana pembangunan Infrastruktur maupun Sarana dan prasarana akan di selesaikan”

Adanya faktor yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam melakukan proses pembangunan sehingga pemerintah daerah telah mencapai target/ sasaran terhadap pembangunan jangka pendek dan untuk pembangunan jangka panjang masih dalam proses pemulihan. Tidak ada target/ sasaran yang pasti di tetapkan oleh pemerintah daerah dalam melakukan proses pembangunan karena semua tergantung dari anggaran tetapi pemerintah daerah telah mencapai target untuk pembangunan jangka pendek dan akan terus melakukan pengusulan anggaran ke pemerintah pusat berapa banyak yang dibutuhkan untuk Recovery pembangunan jangka panjang pasca banjir bandang. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Umardin M Nur dimana ia menyatakan bahwa

“proses pembangunan tidak serta merta langsung jadi karena banyaknya kerusakan yang diakibatkan oleh banjir bandang tetapi pemerintah tidak berhenti untuk terus berupaya dalam melakukan pemulihan terhadap infrastruktur, sarana dan prasarana dan inilah tugas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kecamatan Masamba dan kami berharap semoga seluruh masyarakat mengapresiasi/ menghargai kerja keras kami selama melakukan proses pekerjaan dan diharapkan untuk terus bersabar bagi masyarakat yang belum dicairkan dana bantuan untuk mereka karena semua proses pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah harus melalui proses yang panjang dan bertahap.”

Adapun hubungan antar lembaga pemerintah atau dinas yang terkait sudah terjalin kerja sama diantara pemerintah daerah/ dinas yang terkait dan ada beberapa SKPD yang berperan dalam penanganan pasca banjir diantaranya Dinas PUPR, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kesbang, KB, Dinas Pendidikan karena lembaga pemerintahan ini saling membutuhkan satu dengan lainnya dalam proses kerja pembangunan pasca banjir yang di koordinir oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda.

3. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pemerintah daerah dalam melakukan proses pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir bandang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Pemerintah Daerah yang di nyataka oleh bapak Umardin M Nur dan bapak Mujahid

“dalam proses pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses kerja dalam pembangunan sehingga seperti yang kita lihat di lapangan belum kembali ke kondisi semula”

adapun yang menjdi faktor/ kendala dalam proses pembangunan diantaranya:

- a. yang pertama adalah faktor anggaran, dikarenakan pemerintah daerah tidak mempunyai anggaran untuk memulihkan semua infrastruktur, maupun sarana dan prasana yang mengalami kerusakan pasca banjir bandang sehingga pemerintah terus melakukan upaya seperti memberikan usulan ke pemerintah pusat untuk memberikan bantuan ke pihak pemerintah daerah agar proses pemulihan terhadap infrastruktur maupun sarana dan prasarana dapat kembali ke kondisi semula dan sosial ekonomi masyarakat pulih kembali
- b. Kedua, faktor sosial dimana faktor sosial ini yang paling berat diatasi oleh pemerintah daerah itu sendiri seperti dinyatakan oleh pemerintah daerah dan pihak yang terkait dimana dalam sebuah melakukan proses pembangunan tanggul banyak masyarakat yang tidak setuju khususnya masyarakat yang ada di Daerah Aliran Sungai mereka meminta ganti rugi terhadap lahan yang diambil oleh pemerintah yang dibangun tanggul

diwilayah tersebut selain itu juga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa terbangunnya tanggul jika terjadi banjir susulan dapat semakin memperparah kondisi air yang masuk dalam lingkungan rumah masyarakat jika tanggul tersebut jebol, sehingga faktor sosial yang paling berat dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan proses pemulihan karena di lingkungan masyarakat pemikirannya tidak semua sama dengan itu hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah tersebut yaitu pemerintah daerah melakukan kerja sama pihak yang terkait seperti bagian pemerintahan kelurahan terus melakukan sosialisasi/ pendekatan kepada masyarakat yang tidak setuju seperti masyarakat melakukan aksi demo penolakan pembangunan tanggul sehingga masalah tanggul sampai sekarang yang ada di bantaran sungai Kecamatan masamba sepanjang 1.2 KM belum terealisasikan di daerah tersebut dan tanggul yang akan di bangun di daerah itu di alokasikan ke desa Laba meskipun pembangunan tanggul di kelurahan bone mempunyai peran yang penting tetapi masyarakat sebagian besar menolak adanya pembangunan tanggul didaerah tersebut. Sehingga belum terealisasikan sampai saat ini. Selain itu pemerintah daerah selama ini terkendala dalam perbaikan bahu jalan dikarenakan faktor sosial masyarakat yang banyak menolak karena mereka beranggapan bahwa jika bahu jalan di tinggikan sekian meter akan menyebabkan rumah masyarakat kerendahan di bandingkan jalan sehingga bagaimana pemerintah menangani hal tersebut yaitu dengan cara

memberikan pemahaman secara baik kepada masyarakat yang masih bersangkutan.

- c. Ketiga, Faktor Lahan, hal yang menyebabkan tersebut terjadi karena pemerintah daerah kesulitan dalam menangani masalah lahan pada pembangunan huntap dikarenakan pemilihan lahan betul betul harus sesuai keinginan masyarakat yang terdampak banjir, karena banyak masyarakat yang tidak mau menerima huntap jika lokasi huntap tersebut jauh dari lokasi rumah sebelumnya sehingga pemerintah membutuhkan lahan yang strategis sesuai dengan keinginan/ jangkauan masyarakat.

Dengan demikian cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi faktor/ kendala yang dihadapi dalam proses pemulihan terhadap pembangunan yaitu, pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan pemerintah yang terkait lainnya seperti pihak kelurahan/Desa maupun pemerintah pusat dengan cara pemerintah tingkat kelurahan maupun desa yang terdampak dapat memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakatnya dan juga pendataan yang baik agar masyarakat yang terdampak tersebut di berikan pemahan yang baik agar dapat mendukung proses pemulihan yang dilakukn oleh pmerintah, selain itu juga di butuhkan kerja sama pemerintah pusat dalam menangani masalah pembangunan pasca banjir seperti memberikan Anggrn sesuai pengusulan yang di berikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Selain itu faktor lainnya yang menjadi penghambat dalam melakukan proses pembangunan seperti ruas jalan Taman Kota Masamba yaitu masalah anggaran yang telah direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk penanganan

Covid dan Umardin M Nur Kepala Bidang marga yang mengatasi masalah jalan dan Jembatan menyatakan bahwa

“ InshaAllah Tahun ini akan Tuntaskan” ungkapnya.

Adapun kontribusi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerah berupa anggaran yang tidak terduga cukup besar sekitar ± 50 Miliar dan untuk pengaspalan dalam kota sebanyak 9 Miliar dan untuk jembatan 7 Miliar, untuk hunta masalah lahan pihak pemerintah daerah yang atasi untuk pembangunan provinsi yang atasi seperti dana CSR masyarakat dan yang paling besar dari pemerintah Pusat BPBD dan Pemerintah Pusat DPUPR tidak termasuk pengaspalan sehingga Kontribusi dari pemerintah pusat sangat besar. Data diperoleh dari hasil wawancara.

Selain faktor/ kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan proses pemulihan terhadap pembangunan maka terdapat juga faktor pendukung pemerintah dalam melakukan proses pemulihan terhadap pembangunan Pasca banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara yang telah di rangkum berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah BPBD dan Dinas PU diantaranya:

- 1) Kerja sama/ Kerja team

Tercapainya pembangunan yang sukses dan sesuai perencanaan maka sangat dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak pemerintah baik tingkat pusat, pemerintah daerah maupun pihak kelurahan agar tercapainya pembangunan sesuai perencanaan seperti, pemerintah Pusat memberikan anggaran kepada pemerintah Daerah Kabupaten

Luwu Utara agar pembangunan Infrastruktur maupun sarana dan prasarana secepatnya pulih kembali dan aktivitas masyarakat kembali pulih dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat.

2) Masyarakat

Masyarakat termasuk faktor pendukung pemerintah dalam menjalankan proses pemulihan pembangunan karena di perlukan kesadaran masyarakat dalam merima dan mendukung program pemulihn terhadap pembangunan seperti tidak melakukan penolakan terhadap pembangunan seperti pembangunan tanggul, darinase, maupun huntap dan lain sebagainya selain itu juga diharapkan untuk masyarakat menjaga dan memelihara lingkungan sebaik mungkin karena sumber dari bencana alam itu sendiri adalah ulah manusia itu sendiri sehingga pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan maupun merusak alam lainnya tetapi melakukan penghijauan di wilayah berpotensi bnjir mupun di daerah aliran sungai.

3) Donatur

Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung pemerintah dalam menjlankan Recovery terhadap pembangunan adalah para donatur/orang orang yang mempunyai niat baik dengan memberikan donasi/bantuan berupa uang tunai maupun logistik yang tidak mengharapkan imbalan kembali. Para donatur dianggap faktor pndukung pemerintah dalam menjalankan proses pemulihan Pasca banjir bandang di

Kabupaten Luwu Utara sebagian besar bantuan/ donasi yang masuk berasal dari pihak donator yang telah banyak membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat terjadinya banjir dan sampai sekarang masih banyak orang-orang yang mendonasikan berasal dari pihak donator yang telah banyak membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat terjadinya banjir dan sampai sekarang masih banyak orang-orang yang mendonasikan sebagian pendapatannya untuk pembangunan yang belum di kerjakan oleh pemerintah dimana data tersebut di peroleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak pemerintah daerah Khususnya BPBD dan Dinas PU.

Selain itu juga Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara Membutuhkan kerja sama baik pihak Kecamatan, Kelurahan/ desa agar dapat memberikan pemahaman atau pendekatan yang baik kepada masyarakatnya dengan cara melakukan sosialisasi dengan cara terbuka.

4. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan pasca banjir bandang

Dalam pemulihan pembangunan yang rusak pasca banjir pemerintah perlu melakukan perencanaan tentunya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan . tujuannya agar pembangunan infrastruktur mapun sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir bandang dapat diupulihkan kembali selain itu tercapainya pemulihan terhadap pembangunan maka Sosial Ekonomi Masyarakat yang terdampak banjir bandang dapat pulih kembali sesuai apa yang diharapkan. hal

tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Umardin M Nur selaku kepala bidang Bina Marga yang mengatasi masalah jalan dan jembatan menyatakan bahwa

“pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pembangunan daerah yang rusak pasca banjir bandang, saya berharap masyarakat bersabar karena pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah sifatnya bertahap tidak sekaligus dikarenakan ada kendala atau faktor yang mempengaruhi proses pembangunan “ungkapnya.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai proses pembangunan seperti:

- a. melakukan pengusulan berupa proposal tertulis kepada pemerintah pusat terhadap dana bantuan kegiatan yang belum tercover oleh anggaran, dengan demikian upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah terealisasikan dan dana untuk bangunan yang rusak pasca banjir bandang sudah ada.
- b. Melakukan pembangunan fisik pada infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir bandang. Dalam hal pembangunan fisik pemerintah telah melakukan proses pembangunan secara bertahap.
- c. Selanjutnya pemerintah daerah mengeluarkan program- program seperti memberikan bantuan kepada korban banjir yang mempunyai usaha/ para pelaku UMKM yang terdampak banjir bandang berupa gerobak jualan dan tenda, dan juga Dana Stimulan serta pengalokasian/ pemindahan tempat usaha kepada para pelaku UMKM ke beberapa titik seperti di Sentral Bisnis dan depan Monumen Masamba.

Mengenai hal tersebut upaya pemerintah daerah dalam memulihkan perekonomian masyarakat para pelaku UMKM yang ada di Kab. Luwu Utara dengan melakukan berbagai program, dimana sebanyak 245 para pelaku UMKM yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara menerima bantuan tenda dan gerobak, sebagai tujuan untuk membantu pelaku usaha yang mengalami kerugian pasca banjir bandang. Sehingga pemerintah daerah berharap bantuan yang di berikan pemerintah daerah dapat meningkatkan dan memulihkan kembali perekonomian masyarakat dengan meningkatnya kembali pelaku UMKM agar masyarakat kembali merasakan kesejahteraan, selain itu pemerintah daerah juga menyiapkan Dana Bantuan untuk pemulihan ekonomi pasca banjir bandang yang terdampak, sebanyak 846 UMKM di Luwu Utara yang diberi bantuan dana Stimulan Sebesar Rp 600.00,- / bulan yang berjalan selama 3 bulan. Selain itu pemerintah daerah Kab. Luwu Utara membuat Aplikasi e-mall Lutra dimana aplikasi ini merupakan ikhtiar pemerintah daerah untuk memastikan pemberian layanan yang diberikan kepada korban banjir bandang berjalan dengan baik. Pemerintah Kab. Luwu Utara juga memberikn pelatihan Program pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM itu sendiri. Jaminan kesejahteraan yang di berikan tidak dapat diperoleh tanpa melakukan usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Ar-Rad/13:11.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
 حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ
 دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahannya:

bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Adapun penjelasan data kerusakan di beberapa Sektor yang terdampak pasca banjir bandang, dimana data ini diperoleh dari buku BPBD tahun 2020 dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Mujahid Bidang III yang menangani masalah pasca bencana diantaranya:

a. Sektor infrastruktur

Adapun penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca bencana alam banjir bandang dan tanah longsor Kabupaten Luwu Utara pada sektor Infrastruktur menimbulkan kerusakan sebesar Rp. 104.955.120.000,- dan untuk kerugian mencapai Rp. 2.102.625.000,- sehingga total kerusakan dan kerugian di Kabupaten Luwu Utara mencapai Rp.107. 057.745.000,- dimana angka tersebut terdiri dari kerusakan dan kerugian pada sub sektor transportasi darat, transportasi udara, dan sumber daya air diluar dari Kecamatan Masamba. Secara rinci penilaian dan perkiraan kerugian sektor infrastruktur bisa dilihat dalam tabel 3.1, data bersumber dari buku BPBD tahun 2020.

Tabel 3.1
 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur Pascabencana Banjir
 Bandang dan Tanah Longsor Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

No	Sektor/ Sub Sektor	Niai Kerusakan	Niai Kerugian	Nilai Kerusakan & Kerugian
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Transportasi Darat	92. 570. 920. 000	1. 200. 000. 000	93. 770. 920. 000
2.	Transportasi Udara	690.000.000	100.000.000	790.000.000
3.	Sumber Daya Air	11.694. 200. 000	2.802. 625. 000	12. 496. 825.000
Jumlah		104.955.120.000	2.102.625.000	107.057.745.000

Sumber: Buku Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Utara (2020)

Kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Luwu Utara meliputi sub sektor transportasi darat, transportasi air, sumber daya air (PSDA) dan energi. Pada sub sektor transportasi darat, banjir bandang dan tanah longsor menyebabkan kerusakan pada beberapa ruas jalan dan jembatan kabupaten serta bangunan drainase sebagaimana disajikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Kerusakan Sub Sektor Transportasi Darat
Pascabencana Banjir Bandang dan Tanah Lonsor Di Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2020

No	Sarana dan Prasana	Lokasi Kecamatan	Data Kerusakan		
			Berat	Sedang	Ringan
	Transportasi Darat				
1	Jalan Kabupaten/ Kota				
	Ruas Balebo- Maipi	Masamba	2000		M
	Ruas Masamba- Pincara	Masamba	3000		M
	Jalan Dalam Kota Masamba	Masamba	8500		M
	jalan lingkaran selatan Ruas Baliase- Radda (Baliase- Laba)	Masamba	7800		M
	Jalan Lingkaran selatan Ruas Baliase- Radda (Laba- Radda)	Masamba	5600		M
	Ruas Radda- Meli	Baebunta	3700		M
	Ruas Radda- Perum. Kelapa Gading	Baebunta	800		M
	Ruas baebunta- Dadeko	Baebunta	2450		M
	Ruas Tolada- Grikusuma	Malangke	1100		M
	Ruas Cening- Wara	Malangke Barat	1650		M
	Ruas Waelawi – Labece	Malangke Barat	1340		M
	Ruas Tompe – Waelawi	Malangke Barat	500		M
	Ruas Cening- Kalitata	Malangke Barat	4900		M
	Ruas Urukumpang – Cening	Malangke Barat	3800		M
	Ruas Urukumpang – Londongdou	Malangke Barat	1800		M
	Ruas Tokatapi – Teppo	Malangke Barat	1600		M
	Ruas Tokatapi – Tosipate	Malangke Barat	400		M
	Ruas Cening – Pombakka	Malangke Barat	3400		M
	Ruas Lawewe - Limbong Wara Desa Limbong Wara	Malangke Barat	1800		M
	Ruas Dadeko - Lawewe Desa Lawewe	Baebunta Selatan	3500		M
	Ruas Dadeko - Lawewe	Baebunta Selatan	8800		M
	Ruas Lawewe - To'Galinggang	Baebunta Selatan	3800		M
	Ruas Teteuri- Lembang- lembang Desa Lembang- Lembang	Baebunta Selatan	3500		M
2	Bangunan Drainase				
	Drainase Kompleks Perum. Griya Cendana Permai	Masamba	3000		M
	Drainase/ Saluran Pembuang di Kel. Bone dan Kel. Bone Tua	Masamba	10962		M
	Drainase +Pelestarian di Kel. Bone	Masamba	1850		M
	Drainase/ Saluran Pembuang Radda - Perum. Kelapa Gading	Baebunta	1992		M
	Drainase Kompleks Perum. Kelapa Gading	Baebunta	6734		M

Drainase/Saluran Pembuang di Desa Radda	Baebunta	4062	M
Drainase/ Saluran Pembuang Desa Meli	Baebunta	11092	M
Drainase jalan Ruas Radda – Meli	Baebunta	3996	M
3 Jembatan			
Jembatan Balebo/ Tandung	Masamba	28	M
Jembatan Gantung Pelangi Maipi	Masamba	35	M
Jembatan Gantung Maipi	Masamba	45	M
Jembatan Gantung Kamiri	Masamba	38	M
Jembatan Beton Kamiri	Masamba	8	M
Jembatan Gantung D.I Kurri- Kurri – Kasambi	Masamba	40	M
Jembatan Gantung Lumi	Masamba	100	M
Jembatan Gantng Laba	Masamba	55	M
Jembatan Gantung Meli I	Baebunta	25	M
Jembatan Gantung Meli II	Baebunta	35	M
Jembatan Gantung Meli III	Baebunta	40	M
Jembatan Gantung Petambua	Baebunta	25	M
Jembatan Gantung Radda	Baebunta	50	M
Jembatan Gantung Radda – Laba	Baebunta	25	M
Jembatan Beton Radda	Baebunta	6	M
Jembatan Gantung Malimbu	Sabbang	90	M
Jembatan Gantung Pongo	Sabbang	110	M
Jembatan Gantung Salama	Sabbang	80	M
Jembatan Beton Limbong Wara	Malangke Barat	10	M
Jembatan Kayu Pombakka	Malangke Barat	60	M
Jembatan Gantung Beringin Jaya	Baebunta Selatan	144	M

Sumber: Buku Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Utara (2020)

Sedangkan pada subsektor transportasi udara, bencana banjirbandang dan tanah longsor menyebabkan kerusakan pada Bandara Andi Djemma Masamba sebagaimana di sajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1

Kerusakan Sub Sektor Transportasi Udara Pasca Bencana
Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

No	Sarana dan Prasarana	Lokasi Kecamatan	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan
1.	Transportasi Udara Bandara Andi Djemma (Landasan Pacu)	Masamba			800	M

Sumber: Buku Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Utara (2020)

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Pemerintah daerah, menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya dalam melakukan proses pembangunan bapak Umardin M Nur merupakan kepala bidang marga yang menangani masalah jalan dan jembatan yang mewakili Dinas DPUTRPKP2 menyatakan bahwa

“Bidang permukiman yang banyak mengatasi masalah permukiman umum termasuk masalah permukiman yang terjadi pasca banjir bandang, dimana Dinas PUTRPKP2 yang paling berkontribusi besar dalam penanganan kerusakan pasca banjir bandang, dikarenakan hampir seluruh anggota DPUTRPKP2 melakukan pembukaan akses jalan nasional karena dari kementerian PU memfokuskan yang pertama adalah bagaimana pemerintah daerah dalam membuka jalan utama/ jalan nasional agar memudahkan akses dalam melakukan pembukaan jalan pasca banjir agar bagaimana jalan nasional tersebut bisa dilalui secepatnya.”

selanjutnya penanganan sungai/ daerah aliran sungai (DAS) kepala bidang marga Umardin M Nur menyatakan bahwa penanganan aliran sungai yang sangat berat karena sendimen yang ada di sungai sangat besar karena kiriman dari gunung dimana ketinggian awal eksistensinya ada sekitar 7-8 Meter pasir dan tahan tetapi sebagian besar itu pasir sehinggasampai sekarang belum pulih ke

kondisi semula jika dilihat kondisi sungai. Dalam penanganan sungai dari kementerian DPUTRPKP2 /pusat yang menangani permasalahan yang ada dan pemerintah daerah tugasnya hanya mendampingi dan mengusulkan saja dalam proses pekerjaan.

Selain itu pemerintah pusat membangun tanggul dalam keadaan darurat dengan geoteks yang digunakan untuk membungkus pasir dan ditambahkan batu besar agar dapat tahan yang fungsinya untuk melindungi geoteks dikarenakan geoteks sifatnya rapuh sehingga membutuhkan proteksi dari luar untuk melindungi tanggul ketika ada kayu atau material tajam yang dibawa oleh aliran sungai tidak langsung bersentuhan geoteks dalam jangka waktu tertentu di Daerah aliran sungai yang ada di kecamatan Masamba yang kita lihat seperti sekarang ini. Kembali pada kontribusi pemerintah daerah, pemerintah menyatakan bahwa telah melakukan upaya dalam hal melakukan pengusulan ke pemerintah pusat yang dibutuhkan terkait dalam penanganan masalah banjir seperti untuk Dinas PUTRPKP2 yaitu pertama penangan jalan yang sudah memasuki kondisi membaik yang terkena banjir, yang kedua permasalahan yang ada disungai yang paling berat dikerjakan tidak serta merta langsung pulih tetapi melalui proses yang bertahap, dan pemerintah pusat sendiri mempunyai tahun target terakhir tahun 2025 akan membangun Sabodam (bendungan) yang dibangun di huluyang fungsinya untuk membendung pasir, agar pasir tersebut tidak terus menerus dibawa aliran air dari gunung sehingga Sabodam dapat menahan pasir dari gunung. Dimana kandungan gunung yang menyebabkan banjir bandang yang terjadi pada tanggal 13 juli 2020 kemarin dan adapun penelitian yang dilakukan oleh kampus UNHAS

tahun kemarin menyatakan bahwa gunung yang ada dihulu sebagian besar kandungannya adalah pasir.

Hal yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi jika kerusakan terhadap tanggul ketika terjadi banjir susulan yang akan menyebabkan kerusakan pada tanggul tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak pemerintah daerah menyatakan bahwa rencana awal pembangunan tanggul tersebut sifatnya darurat/ sementara tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah mengevaluasi tanggul tersebut sudah bagus dan sifatnya bisa permanen karena sempat terjadi banjir susulan yang cukup besar dan alhasil tanggul dari geoteks yang ditutup oleh batu besar mampu menahan dan tidak bergeser.

Perencanaan terhadap Infrastruktur maupun sarana dan prasana yang belum dikerjakan pihak pemerintah rencana akan dikerjakan/ dipulihkan pada tahun ini 2022. Dimana rencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang pertama yaitu melakukan pemulihan terhadap jalan yang ada di dalam kota masamba yang termasuk dalam kelurahan bone lengkap dengan drainase, selain itu setelah pasca bencana banjir bandang pemerintah melakukan sistem pendataan secara door to door dengan menanyakan ke pada masyarakat yang terdampak apa yang menjadi kebutuhan dasar seperti pemerintah daerah ini memberikan dana stimulan seperti bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat diberikan Hunian tetap, untuk rusak sedak diberikan bantuan dana 25 juta dan untuk rusak ringan diberikan dana bantuan 10 juta sampai sekarang pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan sifatnya bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu aparat kelurahan bone menyatakan bahwa,

“dapat kita lihat pada kelurahan bone yang mengalami kerusakan cukup banyak/ luas pasca banjir bandang sehingga kolaborasi antara pemerintahan kelurahan bone dengan pihak pemerintahan yang terkait dalam menangani masalah tersebut yaitu dengan melihat dari sisi data awal pasca banjir apa saja yang mengalami kerusakan pada daerah tersebut lalu mengusulkan data tersebut ke

pihak pemerintah yang terkait atau pemerintah daerah itu sendiri selaku pemegang anggaran dikarenakan kelurahan tidak mempunyai anggaran sehingga tingkat II/ Kabupaten yang mempunyai anggaran.”

Yang menjadi tugas oleh Kelurahan adalah mendata dan memberikan usulan terhadap apasaja yang perlu pemerintah benahi dan pihak kelurahan yang utama memprioritaskan kebutuh utama oleh masyarakat dengan demikian itulah yang menjadi usulan pihak kelurahan kepada pemerintah daerah dan apasaja yang menjadi kebutuhan.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan bone menyatakan bahwa

”InshaAllah Tahun ini semua jalan yang belum dipulihkan akan dilakukan rabat beton dan nantinya akan ditinggikan sekitar 4 cm dan ada yang ditinggikan 20 cm tahun ini seperti di daerah sapek kelurahan bone” ungkapnya.

Karena dapat kita lihat bahwa bantaran sungai masamba semakin meninggi karena banyaknya pasir kiriman dari gunung sehingga dapat menyebabkan permukaan sungai menjadi tinggi dengan demikian perlunya dibangun ketinggian jalan.

selain itu juga pemerintah daerah fokus pada hantap dimana kerusakan terhadap bangunan warga dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

Tabel 6.1
Data Kerusakan Rumah Pasca Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

No	Lokasi Kecamatan	Data Kerusakan			Jumlah	Satuan
		Total	Rusak Berat	Rusak Sedang		
	Kecamatan					
1	Masamba	1616	511	155	950	1616 Unit
2	Baebunta	1207	713	40	454	1207 Unit
3	Baebunta Selatan	246	42	0	204	246 Unit
4	Sabbang	183	24	104	55	183 Unit
5	Malangke	313	0	0	313	313 Unit
6	Malangke Barat	204	0	0	204	204 Unit
	Jumlah	3769	1290	299	2180	3769 Unit

Sumber: Buku Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Utara (2020)

Untuk Rumah masyarakat yang terdampak banjir bandang dalam kategori Rusak berat seperti rumah warga yang tersapu rata oleh banjir bandang dan rumah warga yang tidak layak huni akan diberikan bantuan berupa Huntap (Hunian Tetap) oleh pemerintah daerah dimana harga per unit huntap sekitar 50 jt/unit sehingga total keseluruhan rumah warga yang masuk dalam kategori Rusak Berat sebanyak 1,290 unit dan total anggaran yang dibutuhkan adalah 64,500,000,000 Miliar, untuk rumah masyarakat yang termasuk dalam kategori rusak sedang seperti rumah warga yang masih layak huni yang kerusakannya tidak begitu berat dan masih bisa untuk diperbaiki akan diberikan bantuan berupa uang tunai sebanyak 25 jt/ unit sehingga total keseluruhan rumah warga yang masuk dalam kerusakan rusak sedang sebanyak 299 unit sehingga total keseluruhan anggaran yang dibutuhkan adalah 7,475,000,000 Miliar, dan untuk rumah warga yang termasuk dalam kategori Rusak Ringan seperti rumahnya yang dimasuki air dan

kerusakan material rumah yang tidak berat akan diberikan bantuan berupa uang tunai sebanyak 10 jt/ per unit sehingga total keseluruhan rumah warga yang masuk dalam kerusakan ringan sebanyak 2,180 unit dan total anggaran yang dibutuhkan adalah 21,800,000,000 Miliar, Jadi Total Keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk keseluruhan kategori kerusakan sebanyak 93,775,000,000 Miliar untuk Kabupaten Luwu Utara Kecamatan yang terdampak ada 6 diantaranya Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke, dan Kecamatan Malangke Barat. untuk huntap ± 300 yang terealisasi dan 100 persen telah terealisasi khususnya di daerah Aliran sungai/ Zona merah banjir adapun faktor penghambat lamanya proses pembangunan tersebut terealisasi dikarenakan faktor lahan yang menjadi masalah/ kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah karena membutuhkan proses yang panjang dalam menyiapkan lahan tidak serta merta langsung jadi tetapi memakan waktu yang panjang dan lahan itu juga perlu untuk dimantangkan ditimbun dan lain sebagainya sehingga memakan anggaran cukup besar karena pihak pengembal/ pihak yang akan mengerjakan bangunan huntap tidak dapat mengerjakan pekerjaan tersebut jika lahan tersebut betul- betul belum siap, sehingga hal tersebut yang menjadi faktor sehingga belum terealisasi sepenuhnya. Data diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dinas yang terkait.

Sehingga adapun strategi dari pemerintah seperti:

- 1) Melakukan pembangunan di bidang fisik, seperti perbikan bahu jalan, pembangunan tanggul, pembangunan huntap, dan perbikan drainase, serta pembangunan sekolah darurat.

- 2) Pendekatan kepada seluruh masyarakat kecamatan masamba yang mengalami trauma pasca banjir/ sisi kemanusiaan maupun cek kesehatan kepada korban banjir bandang .
- 3) Melakukan pembentukan desa siaga bencana di desa yang terpilih seperti desa yang rawan bencana/ berada di garis merah bencana

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat kecamatan masamba (ibu Gita)

“ upaya yang telah pemerintah daerah lakukan sangat maksimal dan peranan pemerintah daerah sangat luar biasa dalam menjalankan tugasnya dan juga melakukan kolaborasi kerja team antara pihak pemerintahan satu dengan lainnya. Tetapi ada juga masyarakat yang yang kurang mengapresiasi kinerja/ upaya yang telah pemerintah usahakan selama ini khususnya bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang. yang belum mendapatkan bantuan sampai sekarang.”

Sehingga peneliti menyampaikan keluhan dan saran dari masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut kepada pemerintah yang bersangkutan, dengan demikian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah daerah menanggapi secara langsung kepada saya mengenai masalah tersebut seperti yang diungkapkan oleh bapak Mujahidin., Sos. Kepala Bidang I BPBD yang menangani masalah sebelum terjadinya banjir beliau menjelaskan bahwa,

“sebenarnya seluruh pihak pemerintah ingin mempercepat pembagian dana bantuan kepada masyarakat yang menjadi kendala adalah proses pencairan dimana ada juknis didalamnya yang mengatur, dan juknis ini yang mengambil alih ketika uang turun dari pusat mengikuti petunjuk teknis pencairannya.”

“ Masyarakat ini perlu di pahami dimana masyarakat mau cepat di berikan dana bantuan tetap tetapi ada prosedur yang perlu kita patuhi pihak pemerintah mempunyai aturan jangan sampai niat baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat membawa masalah buat pemerintah daerah, ungkapanya.

Dari juknis mengeluarkan peraturan dengan memberikan syarat kepada masyarakat yang akan diberikan dana bantuan dengan memberikan data tanda bukti penyelesaian pembangunan rumah seperti nota- nota tokoh bangunan dan

dibuatkan rincian pekerjaan rumah dan langsung melapor ke pihak lurah atau kepala desa nanti setelah itu pihak juknis yang memberikan langsung dana bantuandan untuk masyarakat yang benar- benar sama skali tidak mempunyai biaya maka diberikan dana bantuannya secara bertahap dan boleh langsung di cairkan dana bantuan dari juknis tetapi harus ada jaminan dan sebenarnya ada dua pilihan bisa dibangun dan bisa membangun sendiri tetapi pihak pemerintah mengambil keputusan itu pemerintah yang membuat kontrak.

Peraturan dari juknis tersebut karena pengalaman dipalu pernah terjadi masalah terjadi tsunami ternyata banyak masyarakat yang dipalu mengambil kesempatan dengan menggunakan dana bantuan tersebut untuk keperluan lain seperti hanya membeli sepeda motor dan lain sebagainya tidak memanfaatkan dana bantuan tersebut sesuai perjanjian. Dan pemerintah menerima dengan baik saran sehingga pemerintah daerah sangat memerlukan/ saran atau keluhan dari masyarakatnya agar pihak pemerintah mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dan dibenahi demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah akan terus berupaya untuk memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakatnya, untuk itu setelah peneliti melakukan penelitian dilingkungan masyarakat maka peneliti menyimpulkan dan menganalisis berbagai permasalahan/ keluhan para masyarakat terhadap pemerintah daerah sehingga hal itu peneliti menyampaikan saran kepada pihak pemerintah daerah atas berbagai permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat yang terdampak banjir bandang agar cepat dipulihkan/ diatasi oleh pihak yang terkait dalam pemulihan pasca banjir bandang.

B. Pembahasan

1. Pencapaian target / sasaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemulihan pembangunan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pencapaian target/ sasaran pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan pasca banjir bandang Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara diukur dengan indikator sebagai berikut:

a. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan pihak yang andil dalam mengambil sebuah keputusan atau pihak pemerintahan yang berhak mengatur wilayah yang ia pimpin demi kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga dalam penetapan target yang di gunakan dalam proses pemulihan infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang rusak pada Kec. Masamba Kab. Luwu Utara tidak ada penetapan target yang pasti karena semua tergantung dari anggaran yang ada dengan demikian pemerintah daerah berupaya dalam melakukan pengusulan proposal terhadap jumlah kegiatan yang belum tercover oleh dana kepada pemerintah pusat agar memberikan dana bantuan untuk proses pemulihan terhadap infrastruktur yang rusak.

Sehingga pemerintah daerah Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara akan berusaha menyelesaikan pemulihan terhadap bangunan yang rusak 2 tahun setelah pasca banjir bandang tahun ini 2022 akhir bulan 12. Seperti yang kita lihat di lokasi kejadian kecamatan Masamba tersebut dapat dikatakan pemulihan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah belum mencapai target karena pembangunan masih dalam proses dilakukan secara bertahap. Dalam Proses pemulihan terdapat berbabagi kendala yang di hadapi pemerintah daerah sehingga pemulihan terhadap pembangunan belum terealisasikan/ mencapai target tetapi pihak pemerintah terus berupaya dalam mengatasi hal tersebut demi kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu pihak pemerintah berharap kerja sama masyarakat sangat diperlukan untuk bersabar karena dalam proses pemulihan pembangunan untuk kondisi yang lebih baik perlu tahapan didalamnya.

b. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan pemulihan terhadap pembangunan, bencana banjir bandang yang terjadi di Kec. Masamba Kab. Luwu Utara menimbulkan banyak kerusakan dan kerugian sehingga pemerintah daerah maupun pusat harus turun tangan dalam menangani masalah tersebut.

Untuk itu pemerintah pusat memberikan dana bantuan kepada pemerintah daerah Kec. Masamba Kab. Luwu utara untuk mempercepat pemulihan dimana program yang di gunakan oleh dana tersebut diantaranya seperti pemulihan terhadap jalan nasional maupun kabupaten karena jalan merupakan akses utama yang banyak dilalui oleh orang- orang dari berbagai daerah, untuk pembangunan tanggul agar dapat mengurangi masalah air sungai yang masuk ke pemukiman warga maupun ke jalan agar cepat teratasi, pembangunan huntap bagi masyarakat yang rumahnya

sudah tidak layak huni, pemberian dana stimulant bagi masyarakat yang rumahnya masuk dalam kategori rusak sedang dan rusak ringan serta pembangunan drainase terhadap wilayah yang rentan banjir.

2. Faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan proses pembangunan infrastruktur, mupun sarana dan prasarana yang rusak dampak banjir bandang

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam proses pemulihan/ recovery pasca banjir bandang Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara diukur dengan indikator sebagai berikut:

a. Faktor proses pembangunan

Yang menjadi alasan pemerintah belum melakukan perbaikan terhadap pembangunan yang rusak pasca banjir adalah adanya faktor yang menjadi kendala dalam pemulihan pembangunan sehingga sebagian infrastruktur maupun sarana dan prasarana lainnya belum dibenahi. Dimana faktor yang menjadi kendala adalah faktor sosial, faktor anggaran maupun faktor lahan faktor faktor inilah yang menjadi penghambat dalam proses pemulihan terhadap pembangunan.

Dimana faktor sosial merupakan kendala yang paling sulit yang di hadapi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena masyarakat yang terdampak banjir bandang tidak semua menerima usulan perbaikan terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah nantinya seperti pembangunan tanggul, dalam pembangunan tanggul sebagian

masyarakat menolak pembangunan tanggul mereka menganggap bahwa pembangunan tanggul tidak bisa menahan air jika terjadi banjir susulan dan akan masuk kelingkungan masyarakat dan mampu merusak pemukiman/ akan memperparah kondisi di daerah aliran sungai.

Selain itu juga masyarakat meminta ganti rugi jika pemerintah membangun tanggul maka masyarakat akan meminta ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang diambil sebagian untuk di bangun tanggul di Daerah Aliran Sungai Tersebut. Sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk tidak membangun tanggul di daerah itu tepatnya berada di kelurahan bone tua dan sampai sekarang daerah tersebut belum dibangun tanggul.

Selain itu yang menjadi kendala oleh pemerintah dalam proses pemulihan yaitu faktor anggaran dimana pemerintah daerah Kec. Masamba Kab. Luwu Utara tidak mempunyai anggarann dalam melakukan pemulihan terhadap pembangunan yang rusak karena sebagian dana yang ada di daerah pada saat itu dialokasikan untuk penanganan Covid, sehingga masih ada kegiatan yang belum tercover oleh dana tetapi disinilah tugas pemerintah daerah akan berusaha secepatnya menyelesaikan proses pemulihan pembangunan tersebut.

Selanjutnya yaitu faktor lahan, dimana faktor ini menjadi kendala pemerintah dalam melakukan proses pembangunan huntap yang belum dilaksanakan karena pemerintah daerah harus mencari lokasi pertanahn yang strategis/ lokasi yang akan di bangunan huntap dekat dengan

wilayah masamba atau wilayah tempat tinggal masyarakat masamba sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala lapangan BPBD yakni Bapak Syahrul Ilahi mengatakan bahwa,

“banyak masyarakat yang menolak/ tidak menerima huntap yang dibangun jauh dari tempat tinggal masyarakat masamba sebelumnya, selain itu juga pihak proyek yang memborong pekerjaan harus menerima bersih artinya masalah lahan harus sudah dibersihkan/ dengan kata lain pihak proyek mau mengerjakan jika lahan tersebut sudah siap sehingga pemerintah daerah terkendala dalam masalah tersebut pemerintah harus menyiapkan anggaran yang banyak, tetapi dapat diketahui inilah tugas pemerintah sebagai wakil masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat agar Luwu Utara bangkit kembali, pihak pemerintah berharap semoga sebagian besar masyarakat mengerti dan dapat mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.” Ungkapnya.

3. Upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan pasca banjir bandang

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan pasca banjir bandang Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara diukur dengan indikator sebagai berikut:

a. Kinerja pemerintah

Kinerja pemerintah merupakan bagian yang terpenting dalam melakukan pembangunan pasca banjir bandang di Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. Karena pada umumnya Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dalam menangani masalah yang terjadi terhadap infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir bandang, dengan demikian pentingnya

peran pemerintah daerah dalam melakukan pemulihan terhadap kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh Bencana banjir bandang.

Dimana pemerintah daerah berperan sebagai koordinator/ sebagai pemecah masalah secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja sama dengan SKPD atau seluruh pihak yang terkait dalam melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.³⁰

b. Organisasi / Lembaga yang terkait

Untuk mencapai sasaran pentingnya kerja sama didalamnya, dimana kerja sama pemerintah satu dengan pemerintah lainnya maupun pihak yang terkait lainnya baik masyarakat, organisasi pada dasarnya diselenggarakan berdasarkan suatu bentuk *win win solution partnership*. Dimana manusia adalah kooperatif apabila berakibat sesuatu yang tidak akan ada, tanpa adanya kerja sama.³¹

Organisasi/ Lembaga yang terkait merupakan bagian yang terpenting dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam melakukan pembangunan pasca banjir bandang Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah Daerah dalam proses pembangunan pasca banjir bandang maka sangat di perlukan kerja sama antar organisasi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Umardin M Nur Mengatakan Bahwa

³⁰ Ayuni Cahya Ningsih “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pasca Bencana Alam di Kabupaten Luwu Utara”, 9 Maret Google Scholar.21 Mei 2022, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13987/>

³¹ Mas Roro. Lilik Ekowati, *Kemitraan dalam Otonomi Daerah*, Cet 1 (Malang: Inteligencia Media, 2017, 2-3.

“pihak pemerintah daerah khususnya Dinas PUPKP2 tidak dapat mengerjakan sendiri proses pemulihan tanpa bantuan dari pihak pemerintahan yang terkait, maka sangat di perlukan bantuan dari pihak yang terkait agar proses pembangunan secepatnya di selesaikan. Untuk itu dapat di ketahui bahwa sekitar 80% pengaruh organisasi lainnya dalam melakukan proses pembangunan agar mendapatkan tujuan sesuai dengan apa yang di harapkan”.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dapat kita ketahui bahwa pentingnya kerja sama antar pihak pemerintah yang satu dengan pihak terkait lainnya agar proses pemulihan terhadap bangunan yang rusak pasca banjir bandang segera pulih dan berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan. sehingga dapat kita lihat beberapa lembaga pemerintah daerah tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, tanpa adanya bantuan dari pihak lain maka proses pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar dan belum terealisasi seperti sekarang ini dan pengaruh Pihak Pemerintah yang terkait dalam Proses pembangunan adalah 80%.

Dapat kita ketahui bahwa lembaga pemerintahan lainnya/ pihak yang terkait sangat berpengaruh besar di dalam proses pembangunan pasca banjir bandang, seperti melakukan pengusulan berupa proposal tertulis kepada pemerintah pusat terhadap dana bantuan kegiatan yang belum tercover oleh anggaran, dan melakukan pembangunan fisik seperti membangun jalan nasional yang rusak pasca banjir, membangun huntap, sekolah, maupun infrastruktur lainnya seperti fasilitas kesehatan, kantor, PDAM maupun bagian transportasi udara seperti bandara andi djemma masamba dimana dana yang digunakan dalam proses pemulihan terhadap infrastruktur maupun sarana dan prasarana tersebut adalah dana dari pemerintah daerah khususnya Dinas PUTRKP2 dan BPBD dan juga bantuan dari pihak Pemerintah Pusat PU dan BPBD dan juga SKPD lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penelitian ini Pencapaian target/sasaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemulihan pembangunan Pemerintah daerah telah mencapai target untuk jangka pendek dan untuk jangka panjang masih dalam proses pemulihan, dalam proses pemulihan adanya kendala yang dihadapi oleh pemerintah tetapi pemerintah daerah terus berupaya semaksimal mungkin dan masih sementara dalam proses. Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara akan menyelesaikan pengerjaan pembangunan sesuai dengan penetapan target. Sehingga pemerintah daerah menyatakan bahwa pemulihan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagian besar telah mencapai target untuk jangka pendek seperti yang kita lihat di lokasi kejadian, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Umardin M Nur dimana ia menyatakan bahwa

“proses pembangunan tidak serta merta langsung jadi karena banyaknya kerusakan yang diakibatkan oleh banjir bandang tetapi pemerintah tidak berhenti untuk terus berupaya dalam melakukan pemulihan terhadap infrastruktur, sarana dan prasarana dan inilah tugas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kecamatan Masamba dan kami berharap semoga seluruh masyarakat mengapresiasi/ menghargai kerja keras kami selama melakukan proses pekerjaan dan diharapkan untuk terus bersabar bagi masyarakat yang belum dicairkan dana bantuan untuk mereka karena semua proses pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah harus melalui proses yang panjang dan bertahap.”

Adapun hubungan antar lembaga pemerintah atau dinas yang terkait sudah terjalin kerja sama diantara pemerintah daerah/ dinas yang terkait dan ada

beberapa SKPD yang berperan dalam penanganan pasca banjir diantaranya Dinas PUPR, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kesbang, KB, Dinas Pendidikan karena lembaga pemerintahan ini saling membutuhkan satu dengan lainnya dalam proses kerja pembangunan pasca banjir yang di koordinir oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda.

2. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pemerintah daerah dalam melakukan proses pembangunan infrastruktur, sarana dn prasarana yang rusak pasca banjir bandang, seperti faktor anggaran, faktor social, dan Faktor Lahan. Dengan demikian cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi faktor/ kendala yang dihadapi dalam proses pemulihan terhadap pembangunan yaitu, pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan pemerintah yang terkait lainnya seperti pihak kelurahan maupun pemerintah pusat dengan cara pemerintah tingkat kelurahan maupun desa yang terdampak dapat memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakatnya dan juga pendataan yang baik agar masyarakat yang terdampak tersebut di berikan pemahan yang baik agar dpat mendukung proses pemulihn yang dilakukn oleh pmerintah, selain itu juga di butuhkan kerja sama pemerintah pusat dalam menangani masalah pembangunan pasca banjir seperti memberikan Anggrn sesuai pengusulan yang di berikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

3. Pemerintah daerah telah berupaya dalam melakukan proses pembangunan maupun pemulihan baik infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir bandang seperti yang kita lihat di wilayah yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang terdampak. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti terus melakukan pengusulan terhadap infrastruktur maupun sarana dan prasarana kepada pemerintah pusat dikarenakan masih banyak kegiatan yang belum tercover oleh dana dan juga melakukan pembangunan fisik sehingga pemerintah menetapkan target pembangunan 2 tahun setelah pasca/ terjadinya bencana untuk jangka pendek dan untuk jangka panjang akan di selesaikan pada tahun yang di tetapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri, Alhasil upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah membuahkan hasil dikarenakan pemerintah daerah yang mengatasi masalah yang tengah terjadi dapat menyelesaikan tugas pembangunannya Akhir tahun 2022 Desember mendatang. Dengan itu Dinas PUTRPKP2 dan BPBD maupun Pihak Pemerintahan Yang terkait lainnya menyatakan bahwa Tahun 2022 akhir bulan Desember nanti InshaAllah semua bangunan yang rusak baik infrastruktur maupun sarana akibat bencana alam banjir bandang akan diselesaikan tahun ini tahun 2022.

Adapun startegi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani masalah terjadinya banjir yaitu:

- a. Pemerintah daerah khususnya BPBD akan membangun Desa Siaga Banjir, dimana hanya desa yang terpilih seperti desa yang berada di garis Merah yang berpotensi/ rawan terjadinya banjir. Yang nantinya akan dilakukan

pelatihan terhadap desa tersebut dan siapa saja yang bisa mendaftarkan dirinya sebagai anggota DSB, sehingga hal tersebut dapat mengurangi korban banjir.

- b. Melakukan pendekatan seperti dari sisi kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak banjir
- c. Melakukan ketahanan pembangunan yang sifatnya jangka panjang seperti pembangunan darisase dan tanggul di Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga dapat menahan jika terjadi banjir susulan.
- d. Selanjutnya pemerintah daerah mengeluarkan program- program seperti memberikan bantuan kepada korban banjir yang mempunyai usaha/ para pelaku UMKM yang terdampak banjir bandang berupa gerobak jualan dan tenda, dan juga Dana Stimulan serta pengalokasian/ pemindahan tempat usaha kepada para pelaku UMKM ke beberapa titik seperti di Sentral Bisnis dan depan Monumen Masamba.

B. Saran

Dengan itu pihak pemerintah daerah sangat menerima kritik maupun saran dari masyarakat agar kualitas kerja pemerintah mempunyai kualitas yang lebih baik lagi sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga terjadinya keterbukaan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk itu saran untuk pihak pemerintah daerah agar dapat selalu melakukan pendekatan, memberikan pemberitahuan dengan baik dan jelas kepada masyarakatnya agar masyarakat yang sifatnya keras sebelumnya dapat menerima dengan baik usulan yang diberikan oleh pemerintah dan untuk masyarakat terimalah usulan dari pemerintah

karena apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maupun untuk semua orang dan hargailah kerja keras atas apa yang dilakukan oleh pemerintah.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Kabul Mahi dan Sri Indra Trigunarjo, *perencanaan pembangunan daerah Edisi I* (Jakarta, Kencana, 2017), h. 48
- Ayuni Cahya Ningsih “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pasca Bencana Alam di Kabupaten Luwu Utara”, 9 Maret 2022, Google Scholar.21 Mei 2022, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13987/>
- Biyani Anugrah Awusi, Herman Nayoan, dan Jones Tampodung, “Kinerja Badan penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir, *Jurnal ilmu pemerintahan* Volume 1, No. 1 (2018): 1, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=upaya+pemerintah+dalam+mengatasi+pembangunan+daerah+pasca+banjir+bandang&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DJL1myVP33bgJ
- Dandi Darmadi, “Komunikasi Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Di Masamba Kabupaten Luwu Utara, *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 11, No. 1 (April 2021): 48, <http://jurnalfdk.uinsby.ac.id/inde.php/JIK>
- Ella Yulaelawati, dan Usman Syihab, *Mencerdasi Bencana*, Edisi I (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), h.17-25
- Fandi Edwin, Herman Najoan, dan Alfon Kimbal, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tikala Pasca Banjir 2014 di Kota Manado),” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 3, No. 3 (2019): 1, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pembangunan+daerah+pasca+banjir+bandang&0q=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dvf/jUTgyGqboJ
- Mas, N. A., Darwis, M., & Fasiha, F. (2022). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 8(1), 75-84.
- Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, Edisi 1 (Malang, UB Press, 2018), h. 2
- Haudi, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Edisi 1 (Sumatra Barat, CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 1
- <https://regional.kompas.com/read/2021/08/24/183247278/perbaikan-infrastruktur-rusak-akibat-banjir-bandang-bupati-luwu-utara-tahun>
- Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, Penerbit WR, 2018), h. 4
- Iskandar Kato et al., *Manajemen Pembangunan Daerah*, edisi 1 (Jakarta: Yayasan Kita Menlis, 2021), h. 1-6

- Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia: Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 27, 32.
https://www.google.co.id/books/edition/Riset_SDM_Cara_praktis_mendeteksi_dimensi/nxsymOE7XmgC?hl=id&gbpv=1&dq=data+primer+adalah&pg=PA32&printsec=frontcover
- John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi ke-4 (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2019), h. 254.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 3
- Mudrajad Kuncoro, “*perencanaan Pembangunan Daerah*,” Edisi I (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2018),
- Muh. Aris Marfai, *Analisis Bencana Menunjang Pembangunan Daerah*, Edisi I (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2021), h. 1-2.
- Muh. Aris Marfai. Suprpto Dibyosaputro dan Hendi Fatchurohman, *Analisis Bencana Menunjang Pembangunan Daerah*, Edisi I (Jakarta: Grasindo dan Gajah Mada University Press, 2017), 1.
- Mas Roro. Lilik Ekowati, *Kemitraan dalam Otonomi Daerah*, Cet 1 (Malang: Intelgensia Media, 2017, 2-3.
- Nabila Hanun Zayain, dkk, “Evaluasi Kebijakan Bencana Alam (Studi Kasus Penanganan Pasca Bencana Banjir di SDN 1 Bendoroto, Kecamatan Munjangan, Kabupaten Trenggalek), *Jurnal Respon Publik* Vol. 14, No. 1 (2020): 50,
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=upaya+pemerintah+dalam+mengatasi+pembangunan+daerah+pasca+banjir+bandang&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DswW5M2jf2j4J
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Edidi ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 143.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Cet. 3 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 63.
- R. Didi Djadjuli, “Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah”, *Jurnal Unigal*, no. 150 (2018): 9, <https://jurnal.unigal.ac.id>
- Rusydi Rasyid, *Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Utara 2020*, Cet I (Masamba: 2021), h. 7&49.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, 465
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, 476.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, 485-492.

Sukirman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*, Cet. 1 (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2015), 242.

Syaifudin, *Banjir Jakarta Suatu Pendekatan Tripple Helix*, Edisi I (Jakarta Timur, UNJ PRESS, 2021), h. 1-2.

V. Wiratna Sujarweni, *metodologi penelitian* (Jl. Wonosari Km.6 Demblaksari Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2020), 19,73



IAIN PALOPO



**DAFTAR
LAMPIRAN**

IAIN PALOPO

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

NAMA : Theeza Lestari

NIM : 18 0401 0140

JUDUL : Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pembangunan
Pasca Banjir Bandang

INFORMAN : Dinas PUTRKP2, BPBD Dan Dinas Yang Terkait

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Upaya Pemerintah Daerah	Kinerja pemerintah	Apakah menurut bapak/ ibu (Masyarakat), kinerja yang dilakukan para pemerintah daerah/ pihak yang terkait yang berperan dalam mengatasi masalah tersebut telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan dan fungsi pemerintah?
		Kontribusi apa saja yang telah pemerintah lakukan dalam menangani masalah pembangunan pasca banjir bandang pak/ ibu? (Pemerintah)
		Bagaimana pihak pemerintah dalam menangani pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir bandang pak/ibu?(Pemerintah)
	Lingkungan	Apakah masih ada infrastruktur atau sarana dan prasarana belum dikerjakan oleh pemerintah daerah dilingkungan sekitar pak/ ibu?
		Jika masih ada kendala/ masalah apa yang menyebabkan sehingga hal tersebut belum terealisasi/ dikerjakan?
		Faktor lingkungan seperti apa yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam melakukan proses pembangunan?
	Organisasi	Bagaimana hubungan antar organisasi atau antar lembaga dalam melakukan pembangunan pasca banjir bandang?
		Apakah organisasi/ lembaga lainnya mempunyai pengaruh besar terhadap Kinerja yang dilakukan pak/ ibu?

		Menurut bapak/ ibu berapa persen pengaruh organisasi/ lembaga lainnya dalam kinerja yang dilakukan pemerintah daerah?
	kebijakan pemerintah	Berapa lama target yang digunakan pemerintah daerah dalam proses pemulihan pembangunan pak/ibu
		Apakah pemulihan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah telah mencapai target/ sasaran pak/ ibu?
		Jika belum mencapai target Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan bagaimana pihak pemerintah daerah dalam mengatasi masalah tersebut pak/ ibu?
Pembangunan pasca banjir bandang	Faktor proses pembangunan	Apa yang menjadi alasan pemerintah belum melakukan perbaikan terhadap infrastruktur atau sarana dan prasarana yang rusak pasca banjir bandang
		Apakah ada faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam melakukan proses pembangunan?
		Menurut bapak/ ibu sudah berapa persen pembangunan yang terealisasikan dari target yang ditetapkan pemerintah daerah dan bagaimana pemerintah daerah mengatasi hal tersebut?
	Realisasi anggaran	Berapa banyak kerugian kerusakan infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang disebabkan banjir bandang pak/ibu?
		Apakah ada anggaran dari pemerintah pusat untuk pemulihan terhadap sarana dan prasarana atau infrastruktur pasca banjir bandang pak/ ibu?

		Jika ada, program apa saja yang menggunakan dana dari pemerintah pusat tersebut?
--	--	--

Informan: Masyarakat

1. Apakah menurut bapak/ ibu (Masyarakat), kinerja yang dilakukan para pemerintah daerah/ pihak yang terkait yang berperan dalam mengatasi masalah tersebut telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan dan fungsi pemerintah?
2. Apakah menurut bapak/ ibu masih ada pembangunan yang belum di realisasikan oleh pemerintah daerah dan bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai masalah tersebut?
3. Bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam menangani masalah pasca banjir bandang bapak/ ibu?

IAIN PALOPO

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara



Melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Dinas PUTRPKP2 yaitu bapak Umardin M Nur kepala bagian Bina Marga yang mengatasi masalah jalan dan jembatan. (2 Maret 2022)



Melakukan wawancara dengan salah satu pegawai BPBD yaitu bapak Syahrul Kasubag Umum dan kepegawaian. (2 Maret 2022)



Melakukan wawancara dengan salah satu aparat Kelurahan Bone (2 Maret 2022)



Melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat korban banjir bandang (2 Maret 2022)



Melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat korban banjir bandang (2 Maret 2022)



Melakukan wawancara dengan salah satu pegawai BPBD yaitu bapak Mujahidin Kepala Bidang I yang mengatasi sebelum terjadinya bencana. (4 Maret 2022)



Melakukan wawancara dengan salah satu pegawai BPBD yaitu bapak Mujahid Bidang III yang mengatasi pasca bencana. (4 Maret 2022)



Melakukan wawancara dengan salah satu pegawai BPBD yaitu bapak Ismar Sukma bagian penataan tingkat I (4 April 2022)



Melakukan wawancara dengan salah satu pegawai BPBD yaitu bapak Nurdin Kabid II penanganan darurat dan logistik (4 April 2022)

IAIN PALOPO

Lampiran 3: Hasil Observasi Lanjutan Peneliti Terhadap Pemulihan Pembangunan dan Perekonomian Pasca Banjir Bandang Di Kabupaten Luwu Utara



Proses pemulihan jalan dan plat duiker (2 Juni 2022)



Jalan trans Sulawesi yang terdampak banjir bandang sudah bisa di lalui (2 Juni 2022)



Proses pembangunan jalan dan Drainase (2 Juni 2022)



Tanggul sepanjang sungai Masamba di Daerah Aliran Sungai Kelurahan Bone Tua (2 Juni 2022)



Bangunan bantuan Huntap (hunian tetap) yang di berikan kepada para korban banjir bandang yang rumahnya sudah tidak layak huni. Yang bertitik lokasi di Desa Radda, Desa Sepakat, kelurahan bone tua dan dusun porodoa Desa Mappedeceng total keseluruhan huntap yang di bngun 1.005 untuk keseluruhan di akecamatan Masamba dan Baebunta dan akan di tuntaskan dalam akhir tahun nanti Bulan desember 2022. (2 Juni 2022).





Pemindahan lokasi UMKM di Sentra Bisnis Masamba yang terdampak banjir bandang dalam meningkatkan perekonomian (3 Agustus 2022)



Pemerintah daerah melakukan pemulihan terhadap perekonomian dengan cara Pengalokasian sementara untuk pasar lama yang terdampak banjir bandang di Kec. Masamba (3 Agustus 2022)

Lampiran 4: surat izin penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 19127/01406/SKP/DPMP/II/2022

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Theeza Lestari beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/071/II/Bakesbangpol/2022 Tanggal 21 Februari 2022
Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Theeza Lestari
Nomor : 082320582871
Telepon :
Alamat : Dsn. Bonde, Desa Baloli Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN)
Instansi :
Judul : Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pembangunan Pasca Banjir Bandang (Kecamatan Masamba Kabupaten Penelitian Luwu Utara)
Lokasi : Dinas Pembangunan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR), Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Penelitian Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Bulan (1 Maret - 31 Maret 2022).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada tanggal : 22 Februari 2022


AHMAD HANI, ST
NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 19127

Lampiran 5: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Theeza Lestari, lahir di Masamba pada tanggal 28 Desember 2000 penulis adalah anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Muliadi dan ibu Ati. M. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jln. Kenanga Desa Baloli Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2012 di SDN 099 Balebo. Kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di MTS Muhammadiyah Masamba hingga tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri I Masamba hingga tahun 2018. Setelah menyelesaikan studi di Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mengambil bidang yang ditekuni yaitu Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

IAIN PALOPO